

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penyusunan dokumen Renja Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Diharapkan dengan tersusunnya dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan pengelolaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mendukung Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih “Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas”.

Dalam penyusunan dan pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur disadari masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran yang membangun untuk perbaikan pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berikutnya. Semoga Rencana Kerja ini berguna bagi pembangunan di Kabupaten Lampung Timur pada umumnya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada khususnya.

Plt. Kepala Dinas,

The image shows a circular official stamp of the Lampung Timur District Office (KABUPATEN LAMPUNG TIMUR) with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Pembina Tingkat I (IV/b)
19771010 199603 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disduk Capil Tahun 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD DukCapil Tahun 2017 dan capaian Renstra OPD DukCapil.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	9
2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD,	43
3.3 Program dan Kegiatan	44

Bab IV Penutup45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur.

Penyusunan Renja berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2026 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) 2026 memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07).
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 – 2021.
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu Tahun 2026, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Capaian Kinerja Organisasi merupakan target sasaran yang ingin atau akan dicapai di tahun 2024 yang merupakan akumulasi kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur dan perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun Realisasi Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

REALISASI APBD TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET		REALISASI			
			ANGGARAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	%	CAPAIAN KINERJA	SATUAN
1	2		3	4	5	6	7	8
1	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.277.280.351		6.851.765.958			
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.201.883		19.264.100			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514	Renstra dan Renja OPD	7.664.200	97,66	2	laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027	Dokumen RKA SKPD	5.882.900	70,21	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6.975.342	Dokumen RKA SKPD Perubahan	5.717.000	81,96	1	dokumen
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.307.031.854		4.135.851.514	96,03		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.096.302.982	Gaji dan tunjangan ASN	3.939.190.114	96,16	12	bln

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	128.700.000	jasa Penyediaan Administrasi Pengelola Keuangan SKPD	114.890.000	89,27	12	bln
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	65.640.000	Jasa Verifikasi pengelola keuangan SKPD	65.640.000	#####	1	laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/Semesteran SKPD	6.900.678	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semester.	6.842.000	99,15	18	laporan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194	Laporan keuangan akhir tahun	9.289.400	97,90	1	laporan
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.550.000		14.550.000	100		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.550.000	Honor pengelola barang SKPD	14.550.000	100	12	bln
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.476.965.064		1.285.800.986	87,06		bln
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.417.172	Alat-alat Penerangan kantor	6.408.120	99,86	12	bln
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	854.635.287	Peralatan dan perlengkapan kantor	822.812.600	96,28	12	bln
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.843.864	Peralatan rumah tangga	27.843.537	100	12	bln

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.149.902	Makanan minuman tamu dan rapat	10.120.500	99,71	12	bln
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71.052.839	Barang cetakan dan penggandaan	71.010.900	99,94	12	bln
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.866.000	Rakornas, Bimtek dan konsultasi, pelayanan keliling desa dan kecamatan	347.605.329	68,58	12	bln
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.087.514.550		1.038.730.693	95,51		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000.000	Jasa pengiriman dok.kependudukan melalui PT.POS	150.000.000	100	12	bln
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.400.630	Listrik, Internet/ Wifi dan Telepon	61.331.493	58,75	12	bln
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	833.113.920	Honor Cleaning service, penjaga malam, sopir, operator, pengamanan	827.399.200	99,31	12	bln
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.017.000		357.568.665	97,16		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	239.270.000	BBM kendaraan Dinas, Service Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan Dinas	228.868.665	95,65	12	bln
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	Service AC, Laptop, printer	20.300.000	#####	12	bln
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	108.447.000	rehab ruang tunggu	108.400.000	99,96	12	bln
	II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	992.342.064		984.022.200	99,16		
	1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	992.342.064		984.022.200	99,16		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	177.044.581	registrasi dokumen dafduk	173.487.700	97,99	12	bln
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	815.297.483	Belanja ribbon, ATK pencetakan KK KTP	810.534.500	99,42	105	unit
	III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	154.999.896		154.626.060	99,76		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	154.999.896	registrasi Akta-akta Catatan Sipil	154.626.060	99,76	12	bln
	IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	272.583.959		243.702.400	89,40		

	1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	272.583.959		243.702.400	89,40		
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	120.053.960	Updating Database	115.058.500	95,84	12	bln
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	152.529.999	MoU, PKS dan Pemanfaatan Data	128.643.900	84,34	5 Pemdes	kali
Jumlah			8.697.206.270		8.234.116.618	94,68		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Analisis Kinerja

Adapun analisis capain kinerja atas sasaran strategis Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Timur, Sukadana. Kode Pos 34194

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AMRIADI,S.H**

Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hi.M.DAWAM RAHARDJO**

Jabatan : **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

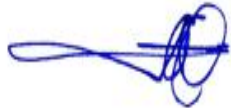
Selaku atasan pihak pertama, selanjunya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukadana, 3 Januari 2024

Pihak Kedua



Hi.M.DAWAM RAHARDJO

Pihak Pertama



AMRIADI,S.H
NIP.19641002 1992031003

Renja Dukcapil 2026

11

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen Adminduk.	a. Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)	98%
		b. Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	99%
		c. Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	60%
2.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan di Pemkab Lampung Timur.	a. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dalam pelaksanaan kebijakan	55%
3.	Meningkatnya penerapan inovasi layanan Dukcapil.	a. Persentase Inovasi pelayanan yang diterapkan	100%

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.138.488.416,-
2. Program Pendaftaran Penduduk	992.342.064,-
3. Program Pencatatan Sipil	154.999.896,-
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	272.583.959,-

Sukadana, 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



Hl.M.DAWAM RAHARDJO

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



AMRIADI,S.H
NIP.19641002 1992031003

- a. Analisis capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis.
- Sasaran strategis merupakan target sasaran yang ingin atau akan dicapai di tahun 2024 yang merupakan akumulasi kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur dan perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

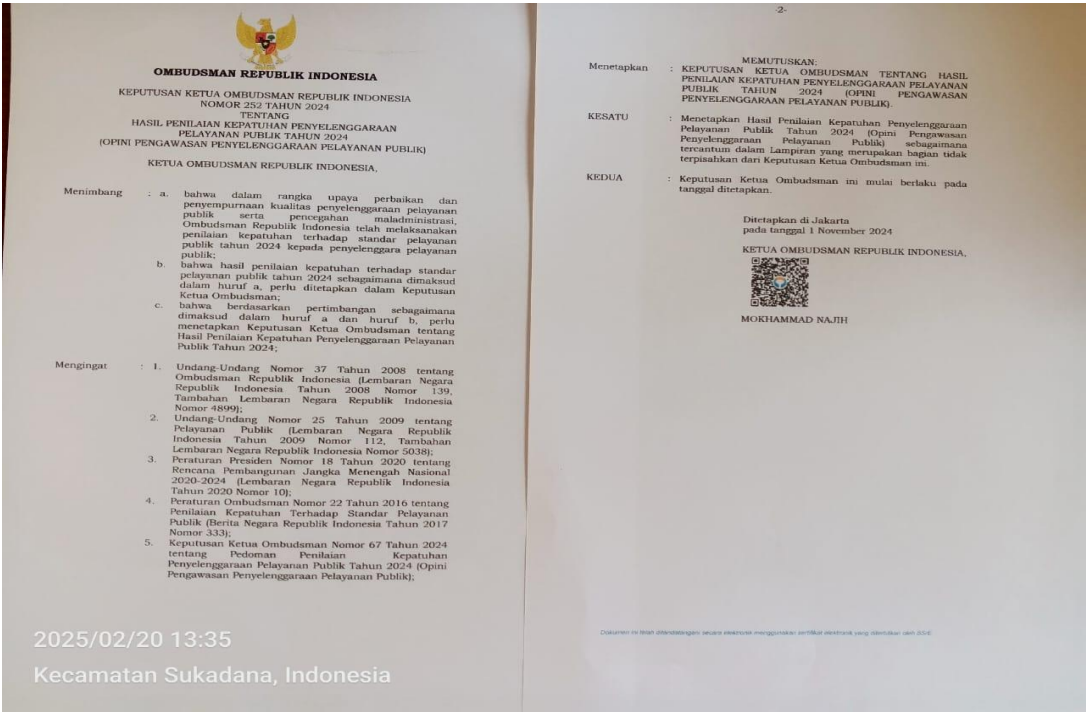
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2024 telah melakukan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Inovasi tersebut meliputi aspek sistem dan mekanisme kerja pelayanan maupun SDM pelayanan yang secara akseleratif telah mengalami peningkatan yang signifikan.

Guna mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur melakukan pelayanan secara online melalui aplikasi SILAMTIM BERJAYA.

selain itu melakukan pelayanan langsung dikantor dinas dan melakukan pelayanan keliling yang dapat menjangkau wilayah pelosok yang jauh dari ibukota kabupaten dan perbatasan dengan kabupaten sekitar dalam upaya memudahkan akses Masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 telah mendapat Penilaian Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh ombudsman Tahun 2024 memperoleh nilai 95,08 Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) untuk pelayanan publik.



1. Realisasi Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target IKU Tahun 2024.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Per Indikator Tahun 2024 Disdukcapil

No	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALISA SI
1	Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen Adminduk.	Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)	98%	99%
		Kepemilikan Dokumen akta kelahiran Kartu Identitas Anak (KIA) dan.	99%	98%
		Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) dan.	60%	42%
2	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan di Pemkab Lampung Timur.	persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dalam pelaksanaan kebijakan	55%	25,9%
3	Meningkatnya penerapan inovasi layanan di Dukcapil	Persentase inovasi pelayanan yang diterapkan	100%	100%

2. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran 1 :

Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen Adminduk.
Pada Tahun 2024 capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) capaian kinerjanya mencapai 99%, meningkat 1% dari capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 97%, namun masih kurang 0,3 % target IKU 2021-2026 .

a. Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el).

tabel 3.2
Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)
Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el).	98%	99%	101%

Hasil capaian 101 % menunjukkan sejauh ini realisasi telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.3
Perbandingan Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el).	96%	97%	99%	100%	100%	101%

- c. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el).	99,4%	99%	101%

Realiasi 99 % telah mencapai target yang telah ditetapkan dari RPJMD, meskipun realisasi diatas target RPJMD yaitu target 99,4%, tingkat pencapaian terhadap target sudah sangat tinggi, dengan demikian capaian 101%, bisa dikatakan bahwa program kepemilikan dokumen sepenuhnya memenuhi perencanaan RPJMD.

- d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

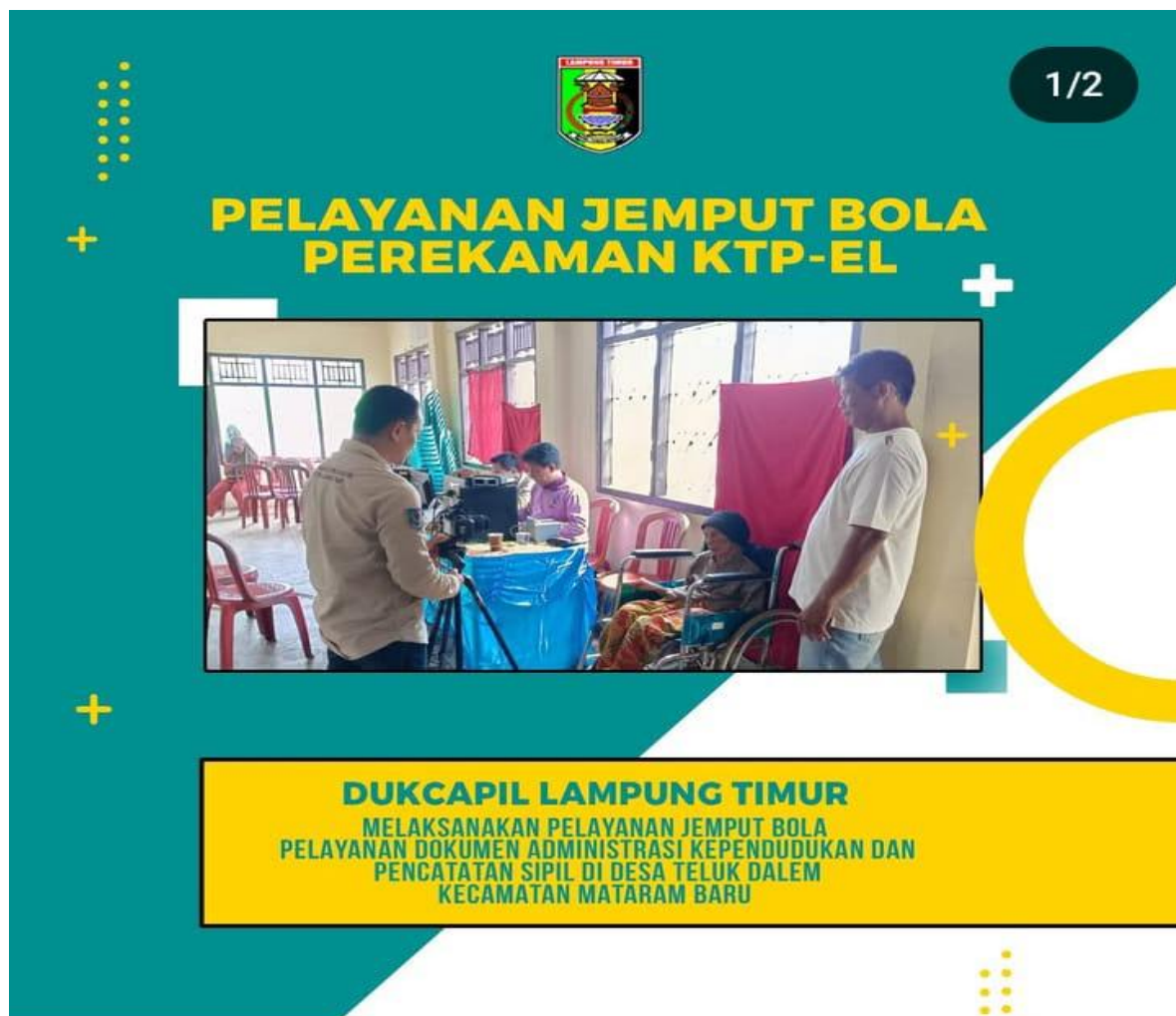
Tabel 3.5

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el)	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	99,6%%	101%
Provinsi Lampung	100%	99,7%
Nasional	100%	99,7%

e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) antara lain:

- 1) Disdukcapil telah melakukan koordinasi dengan camat untuk memerintahkan operator perekaman KTP-el yang bertugas dikecamatan untuk melakukan perekaman jemput bola di desa-desa dalam kecamatan, dimana petugas dari Dinas Dukcapil juga melakukan perekaman keliling ke sekolah-sekolah, pondok pesantren, penyandang disabilitas dan ODGJ ke seluruh kecamatan dan desa di kabupaten lampung timur.





2) Untuk mewujudkan target-target capaian yang telah ditetapkan maka Disdukcapil telah menerapkan inovasi untuk meningkatkan capaian kinerja, inovasi peningkatan capaian target perekaman, yaitu: Lamtim paling cakep, Silamtim Berjaya, Lengkap, Gham Cakak Perwatin, Plesir Jauh.



- f. Permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen KTP-el sebagai berikut:
- 1) Penduduk tidak berdomisili sesuai dengan dokumen kependudukan dan penduduk yang domisilinya jauh dari pelosok desa dan yang terletak di perbatasan dengan kabupaten lainnya dan penduduk rentan administrasi kependudukan (Disabilitas, ODGJ, dan Orang terlantar)
 - 2) Keterbatasan alat perekaman KTP-el dan sarana prasarana pencetakan KTP-el .
 - 3) stock balngko KTP masih bergantung dengan pusat
- g. Solusi permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen KTP-el
- 1) Disdukcapil telah melakukan pelayanan jemput bola penuntasan dokumen adminduk bagi semua penduduk di wilayah Kabupaten Lampung Timur
 - 2) Untuk pemenuhan sarana prasarana Disdukcapil berupa alat perekaman di kecamatan dan peralatan pencetakan dokumen kependudukan, Disdukcapil sudah menganggarkan alat perekaman, printer KTP-el dan KIA, Printer, dan Personal Komputer.
 - 3) Untuk pemenuhan akan KTP-el, setiap seminggu sekali petugas Dukcapil mengambil langsung KTP-el ke Dirjenminduk di Jakarta.
- h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

tabel 3.6
 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) .	99%	99,4%	99,4%

Kinerja 99 % menunjukkan hasil yang sangat baik dan pencapaian target kepemilikan dokumen kependudukan, penyerapan anggaran 99,4 % menandakan bahwa hamper seluruh dana telah digunakan, meskipun hasilnya masih sedikit dibawah target.

- i. Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) format sabagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Program kegiatan Tahun 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: Pendaftaran Penduduk	992.342.064	984.022.200
	Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk	992.342.064	984.022.200
	Sub kegiatan: Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	815.297.483	810.534.500

Sasaran 1 :

Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen Adminduk

Pada Tahun 2024 capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran capaian kinerjanya mencapai 98%, meningkat 2% dari capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 96%, namun masih kurang 1 % target IKU 2021-2026 .

a. Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran
tabel 3.8

Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta kelahiran dan KIA
Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	99%	98%	98,9%

a. Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran capaian realisasi terhadap target adalah 98,9%, hal menunjukkan walaupun belum mencapai target yang ditetapkan pencapaian sangat mendaki, dengan capaian **baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran dan KIA tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.9
Perbandingan Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	96%	96%	98%	98,9%	97,9%	99,9%

c. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	99,6%	98%	98%

- d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	97,9%%	98,9%
Provinsi Lampung	100%	100%
Nasional	100%	100%

- e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran antara lain:
- Disdukcapil melakukan inovasi berupa layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket yaitu :
 - Pelayanan pengantaran antar alamat dokumen adminduk capil kepada warga masyarakat lampung timur melalui Kerjasama dengan Kantor POS.
 - PALING MANTAB (Pelayanan Daring Administrasi Kependudukan Terintegrasi Bersama BPJS Kesehatan)
- f. Permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen Akta Kelahiran sebagai berikut:
- Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Disdukcapil Kabupaten Lampung

g. Solusi permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen Akta Kelahiran:

- 1) Disdukcapil telah melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Silamtim Berjaya sekaligus pelayanan jemput bola penuntasan dokumen adminduk bagi semua penduduk di wilayah Kabupaten Lampung Timur

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

tabel 3.12

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Kepemilikan Dokumen Akta kelahiran.	98%	99,7%	99,7%

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana bahwa setiap 100% anggaran yang digunakan meghasilkan 98,29 persen, capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah sangat efisien.

i. Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta kelahiran dan KIA format sebagai berikut :

Tabel 3.13

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: Pencatatan Sipil	154.999.896	154.626.060
	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan SIpil	154.999.896	154.626.060

Sasaran 1 :

Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen Adminduk

Pada Tahun 2024 capaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA (Kartu Identitas Anak) capaian kinerjanya mencapai 42%, meningkat 6% dari capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 36%, namun masih kurang 18 % target IKU 2021-2026 .

j. Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA

tabel 3.8

Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	60%	42%	70%

Dari target 60 % realisasi 42 % telah mencapai 70 % dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pencapaian masih cukup jauh dari target, dengan demikian capaian kategori **cukup**.

k. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.9

Perbandingan Indikator Persentase Kepemilikan KIA tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	36%	37%	42%	90%	74%	70%

1. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran dan KIA tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)	80%	42%	53%

- m. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA, Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

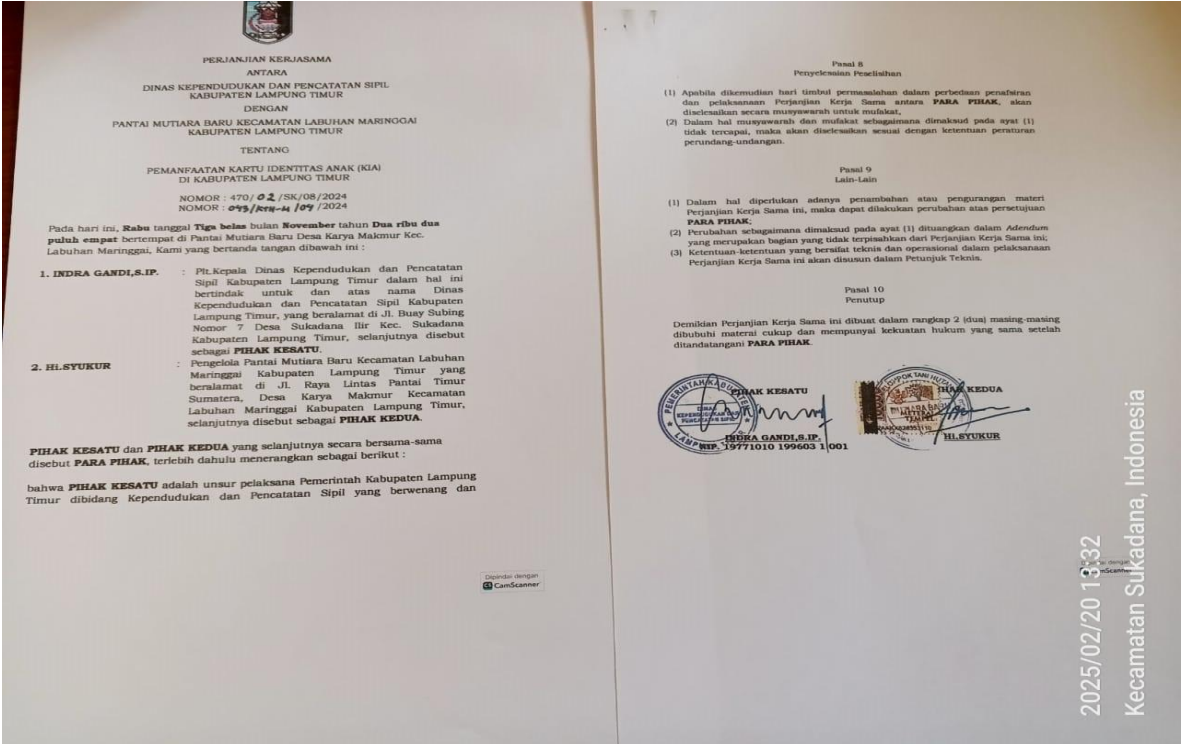
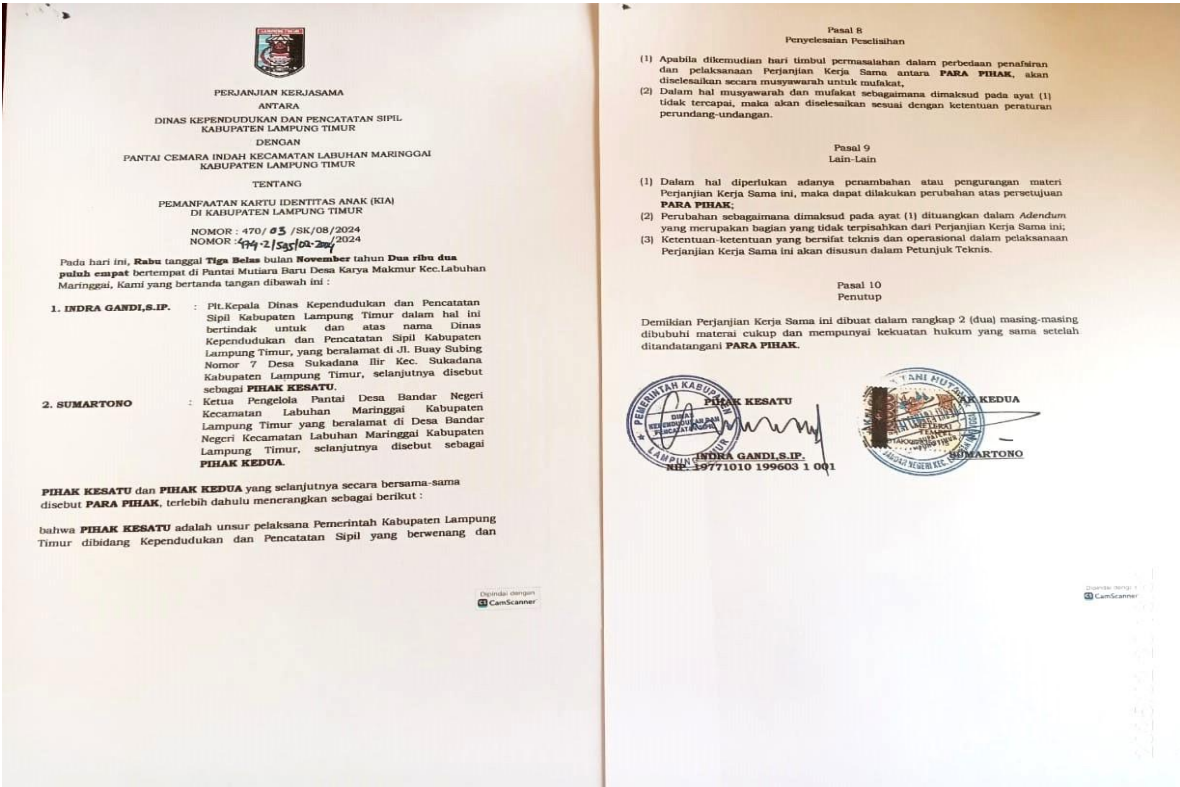
Tabel 3.11

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase Kepemilikan Dokumen KIA	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	97,9%%	98,9%
Provinsi Lampung	100%	100%
Nasional	100%	100%

- n. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA antara lain:
 - 1) Disdukcapil melakukan inovasi berupa layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket yaitu :
 - LAMTIM CERIA (Pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi melalui cetak rekam identitas anak .

- Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan tempat hiburan anak untuk meningkatkan cakupan KIA yang telah dilakukan dengan mitra yaitu; Pantai Muara Baru Desa Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai dan Pantai Cemara Indah Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.



- 2) Permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen KIA sebagai berikut:
 - a. Masih kurangnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pembuatan KIA yang bekerjasama dengan pihak sekolah, PAUD, TK, maupun SD dalam pembuatan KIA (layanan kolektif pembuatan KIA) terbatas alat perekaman KTP-el dan sarana prasarana pencetakan KTP-el.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana pencetakan KIA
- 3) Solusi permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan dokumen KIA:
 - a. Untuk pemenuhan capaian kepemilikan KIA, Disdukcapil telah melakukan Kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui kepala UPTD PAUD, TK dan SD untuk mendata siswa nya yang belum memiliki dokumen akta kelahiran dan KIA, kemudian mengumpulkan dokumen persyaratan pembuatan akta kelahiran dan KIA (jemput bola) yang akan di tindaklanjuti oleh Disdukcapil untuk mencetak dokumen Akta kelahiran dan KIA, setelah dokumen jadi kemudian diserahkan Kembali ke pihak sekolah.
 - b. Untuk memenuhi sarana prasarana pencetakan dokumen KIA, Disdukcapil pada TA. 2024 telah mengalokasikan printer pencetakan KIA, Ribbon (tinta printer KIA), personal computer dan kursi operator.
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

tabel 3.12
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Kepemilikan Dokumen KIA .	98%	99,7%	99,7%

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana bahwa setiap 100% anggaran yang digunakan menghasilkan 98,29 persen, capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah sangat efisien.

- 5) Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA format sebagai berikut :

Tabel 3.13

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: Pendaftaran penduduk	154.999.896	154.626.060
	Sub kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	154.999.896	154.626.060

Sasaran 2 :

Sasaran 2 yaitu: Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan di Pemkab Lampung Timur.

Pada Tahun 2024 capaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan capaian kinerjanya mencapai 27%, sama dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 27%, masih kurang 73 % dari target IKU 2021-2026 .

a. Capaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan

Tabel 3.14

Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan
Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	55%	27%	49%

Dari target 55 % realisasi 27 % telah mencapai 49 % dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pencapaian masih cukup jauh dari target, dengan demikian capaian kategori **kurang**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.15

Perbandingan Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	37%	29%	27%	82%	58%	49%

c. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan OPD yang memanfaatkan data kependudukan tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	65%	27%	41,5%

d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

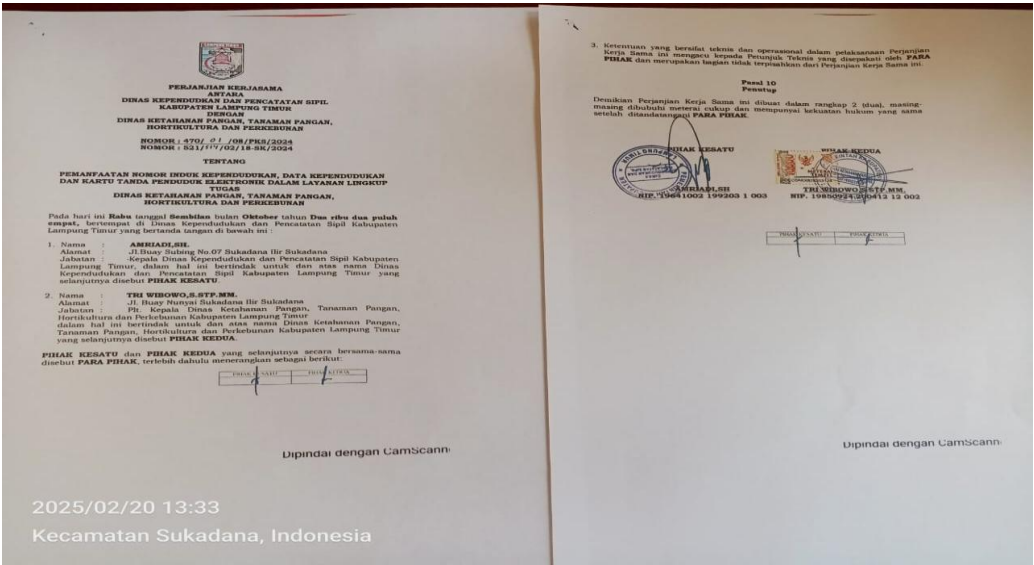
Tabel 3.17

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	58%	49%
Provinsi Lampung	53%	46,6%
Nasional	53%	46,6%

e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan antara lain:

- 1) Disdukcapil telah melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan NIK untuk verifikasi data pribadi/perseorang dalam pelayanan public seperti program Kesehatan, Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kepada opd dan atau Lembaga pengguna.
- 2) Untuk tahun 2024 Disdukcapil telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data dengan Dinas Pertanian dan masih dalam tahap permohonan akses data dengan Dirjen Dukcapil.



- f. Permasalahan dalam pencapaian target persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sebagai berikut:
- 1) Masih rendahnya OPD yang memanfaatkan data dan hak akses data yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil.
 - 2) Penerapan Sertifikasi ISO 27001:2013 bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan. Adanya kebijakan cyber security dari pemerintah pusat saat ini berdasarkan surat edaran Ditjendukcapil Kemendagri bahwa adanya persyaratan tambahan Sertifikat ISO 27001:2013 bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan menjadi kendala dalam mencapai target indikator OPD yang akan memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja, memerlukan anggaran yang besar bagi OPD yang akan membuat sertifikat ISO 27001.
- g. Solusi permasalahan dalam pencapaian target Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan
- 1) Disdukcapil telah melakukan sosialisasi pemnfaatan data kependudukan untuk perencanaan Pembangunan dan pelayanan public dengan mengundang OPD se Kabupaten Lampung Timur.
 - 2) Membuat surat edaran terkait Sertifikat ISO 27001:2013 bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan.
- h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

tabel 3.18
 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	27%	84,3%	84,3%

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana bahwa setiap 100% anggaran yang digunakan menghasilkan 84,3 persen, capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah efisien.

- i. Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan format sabagai berikut :

Tabel 3.19

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	272.583.959	243.702.400
	Kegiatan: Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	152.529.999	128.643.900
	Sub kegiatan: Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.	152.529.999	128.643.900

Sasaran 3 :

Sasaran 3 yaitu: Meningkatnya penerapan inovasi layanan dukcapil

Pada Tahun 2024 capaian Inovasi Pelayanan kinerjanya mencapai 100%, sama dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 100%, mencapai target IKU 2021-2026 .

a. Capaian Persentase Capaian Inovasi Pelayanan

tabel 3.26

Indikator Capaian Inovasi Pelayanan Tahun 2024			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Capaian Inovasi Pelayanan	99%	100%	100,1%

Hasil capaian 100,1 % menunjukkan sejauh ini realisasi telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2022 S/D 2024.

tabel 3.27

Perbandingan Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2022 S/D 2024.

Indikator	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Capaian Inovasi Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c. Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2024 dengan target RPJMD.

tabel 3.28

Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2024 dengan target RPJMD.

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2024	Capaian kinerja
Capaian Inovasi Pelayanan	99%	100%	100,1%

- d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Capaian Inovasi Pelayanan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Tabel 3.29

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Capaian Inovasi Pelayanan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi.

Persentase Capaian Inovasi Pelayanan	Capaian	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Lampung Timur	100%	100%
Provinsi Lampung	100%	100%
Nasional	100%	100%

- e. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian Persentase Capaian Inovasi Pelayanan antara lain:

Disdukcapil telah melakukan inovasi pelayanan pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) inovasi antara lain:

- PUAKHI (Pelayanan jemput bola aktivasi dan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat di lampung timur
- PLESIR DJAUH (Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat desa yang letaknya jauh dari ibukota kabupaten atau berada diperbatasan kabupaten lain.
- LAMTIM CERIA (Pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi melalui cetak rekam identitas anak.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

tabel 3.30

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Indikator	Capaian kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
Persentase Capaian Inovasi Pelayanan	100%	68,5%	68,5%

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana bahwa setiap 100% anggaran yang digunakan menghasilkan 68,5 persen, capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah belum efisien.

- g. Penjelasan program/kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan dalam pencapaian Inovasi Pelayanan format sebagai berikut :

Tabel 3.31

No.	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1.	Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.277.280.351	6.851.765.958
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.476.965.064	1.285.800.986
	Sub kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.866.000	347.605.329

2.3 ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur antara lain;

- Melaksanakan **4 (empat) arahan pokok Menteri Dalam Negeri**, yaitu:
 - Melakukan berbagai upaya progresif untuk menjamin akurasi data kependudukan, karena Dukcapil akan terus dihadapkan pada tantangan tingginya dinamika penduduk seperti pindah, datang, lahir, mati, kawin dan cerai. Untuk itu inovasi harus terus dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna data kependudukan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data.

- b. Ancaman siber terhadap data kependudukan semakin nyata di tengah konflik global dan kompetisi data. Penguatan teknologi penyimpanan (*cloud hybrid*), *firewall*, enkripsi dan sistem deteksi ancaman (*threat detection*) harus menjadi prioritas investasi ke depan. Ditjen Dukcapil dan seluruh Dinas Dukcapil agar terus berkomitmen menjaga keamanan informasi dan data kependudukan melalui penerapan Standar ISO 27001:2013.
 - c. Melakukan percepatan aktivasi IKD melalui strategi jemput bola dan kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah serta pihak terkait lainnya. Bagi masyarakat yang memiliki *smartphone* tanpa meninggalkan KTP-el bagi penduduk yang tidak memiliki *smartphone*.
 - d. Meningkatkan kualitas SDM Dukcapil dan pemahaman masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi IKD. Oleh karena itu, pelatihan intensif untuk aparatur Dukcapil, serta kampanye edukatif ke masyarakat mengenai manfaat dan keamanan IKD, menjadi program penting yang harus digerakkan secara sistematis.
2. Jajaran Dinas Dukcapil agar lebih proaktif dan agresif mengejar masyarakat yang belum terdata baik di daerah terisolasi maupun perkotaan, diantaranya dengan membuat langkah-langkah proaktif dengan cara yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan cakupan perekaman data kependudukan.
3. Dalam rangka pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam penerbitan dokumen kependudukan perlu kesinambungan ketersediaan blangko KTP-el di daerah, mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah yang memiliki **kapasitas fiskal tinggi** dapat memberikan hibah.anggaran penyediaan blangko KTP-el melalui APBD.

- Menginternalisasikan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, serta indicator dan target RPJMN 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 untuk urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Percepatan aktivasi IKD melalui strategi jemput bola secara massal dan terjadwal melalui kolaborasi dengan sekolah (bagi siswa yang berusia 17 tahun), Perguruan tinggi, komunitas keagamaan, komunitas adat, serta berbagai pihak lainnya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

PRIORITAS PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN	FOKUS/PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS PROVINSI (PP)	PAGU INDIKATIF (MILYAR)
Peningkatan pelayanan publik	Pelayanan publik, pemenuhan SPM, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemda dan Layanan Publik Berbasis Digital: - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil - Program Pengelolaan Profil Kependudukan - Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Masyarakat yang beradab, berkeadilan dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas	

PRIORITAS	KEGIATAN	SASARAN	INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	Peningkatan Tata Kelola Pemda dan Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan zonasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

No	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil kegiatan	Besaran/volume
1	Pelayanan zonasi layanan di 5 zona pelayanan	Masyarakat dapat membuat dokumen kependudukan dan capil cukup di zona pelayanan yang terdekat yaitu di kantor kecamatan d pemohon, tanpa perlu harus datang ke kantor Disdukcapil di Sukadana, untuk memangkas jarak, waktu dan biaya.	Rp 50.000.000,-

2	Program Isbath Nikah Terpadu, kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Pengadilan Agama dan Kementrian Agama Kabupaten Lampung Timur	Penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama, Buku Nikah yang diterbitkan Kementrian Agama dan Dokumen KK, KTP dan Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Disdukcapil	Rp 150.000.000,-
3	Program Kerjasama antar Lembaga dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan dan capil dan pelayanan dokumen dukcapil bagi penduduk rentan dan penduduk non permanen	Dokumen KK, KTP yang diterbitkan setelah pernikahan hasil kolaborasi dukcapil dan kementrian agama (Kado Nikah), perekaman. Dokumen kependudukan dan capil bagi lansia terlantar, ODGJ, pengidap ATM, korban bencana alam dan penduduk pelintas batas seperti Pekerja Migran	Rp 350.000.000,-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perubahan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil membawa implikasi penting dalam pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Misalnya dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Spesifikasi untuk pengadaan formulir yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

KTP Digital adalah **Identitas Kependudukan Digital** (IKD) dalam bentuk aplikasi digital yang diakses melalui smartphone. Untuk membuat KTP Digital dapat dengan mengunduh atau download aplikasi IKD oleh Kemendagri melalui PlayStore. Tujuan dari penerapan IKD adalah untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital dan mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Dalam rangka mendukung keterpaduan layanan digital nasional dan implementasi *Digital Public Infrastruktur* (DPI), pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan SPBE Prioritas, sesuai ketentuan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, perlu dilakukan Langkah antara lain; Peningkatan capaian target IKD diatas 30% dari total perekaman, melalui program kegiatan yang terstruktur dan terukur serta mengoptimalkan semua sumber daya, jemput bola secara massal dan terjadwal untuk aktivasi IKD dengan menggandeng sekolah, perguruan tinggi, komunitas keagamaan, komunitas adat serta pihak lainnya.

Peningkatan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dengan optimalisasi pelayanan pendaftaran penduduk dengan optimalisasi pelayanan melalui beberapa inovasi pelayanan yang diterapkan diantaranya;

1. Inovasi Pelayanan zonasi yang dilaksanakan di 5 (lima) zona pelayanan antara lain:
 - a. Zona I di Kecamatan Way Jepara di Kantor Kecamatan Way Jepara
 - b. Zona II di Kecamatan Batanghari di Kantor Kecamatan Batanghari
 - c. Zona III di Kecamatan Marga Sekampung di Kantor Kecamatan Marga Sekampung
 - d. Zona IV di Kecamatan Mataram Baru di Kantor Kecamatan Mataram Baru
 - e. Zona V di Kecamatan Labuhan Maringgai di Kantor Kecamatan Labuhan Maringgai
2. Inovasi Isbat Nikah Terpadu; yaitu Kerjasama yang di jalan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini Dinas Dukcapil, dengan Pengadilan Agama Sukadana dan Kementrian Agama Lampung Timur, yaitu mengadakan sidang isbat berikut penerbitan Penetapan Sidang Isbath, penerbitan Buku Nikah bagi pasangan yang telah melalui isbath nikah dan penerbitan Dokumen perubahan KK, KTP-el dan Akta kelahiran, yang dilakukan dalam satu waktu, di tempat pelaksanaan isbath nikah terpadu, dengan sasaran ditujukan bagi pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan yang belum tercatat secara hukum negara.
3. Layanan inovasi jemput bola pelayanan perekaman dokumen bagi penduduk rentan dan penduduk non permanen, bagi penderita ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa, penderita ATM (AIDS, Tuberkolosis dan Malaria), Lansia Terlantar, orang terlantar, anak terlantar, penghuni lembaga permasyarakatan dan penduduk pelintas batas
4. Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk non muslim, Kerjasama Disdukcapil dengan pemuka-pemuka agama non muslim.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur juga berkomitmen untuk mendorong OPD serta instansi/lembaga lingkup provinsi, kabupaten/kota dalam hal pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dengan menggunakan DWH Terpusat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

1.2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur di tahun Anggaran 2026 adalah;

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) : 99,4%
2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun: 99,6%
3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA): 80%
4. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dalam perumusan kebijakan : 65%
5. Persentase Inovasi Pelayanan: 100%

1.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

- ❖ Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 adalah merupakan implementasi dari misi sebagai indikatornya yaitu :
 - a Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan database yang akurat.
 - b Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
- ❖ Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun Indikator sasarannya adalah:

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data
5. Inovasi Pelayanan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain;
- Pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja TA. 2024
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.	Peningkatan standar kualitas pelayanan OPD	Penyelesaian Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	99,4%
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	99,6%
			Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80% desa
			Pemanfaatan Data oleh OPD	65%
			Inovasi Pelayanan	100%

- a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.(sebagaimana terlampir).

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 tertuang dalam program dan kegiatan yang disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur 2021-2026.

Target Kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2026 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam upaya mencapai Visi, Misi serta Tujuannya.

Dengan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat Lampung Timur Berjaya.

Sukadana, juni 2025

Kepala Dinas,



INDRA GANDI, S.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
19771010 1199603 1 001

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

RENJA 2025

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur untuk periode satu tahun mendatang. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Peraturan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Substansi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026 dan memuat agenda prioritas Bupati Lampung Timur.

Dinamika perubahan lingkungan kerja terjadi begitu cepat dengan perubahan pimpinan daerah terutama dengan adanya perubahan susunan organisasi perangkat daerah



berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Adanya penyesuaian struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur menekankan pada penyediaan infrastruktur dasar wilayah berupa jalan, jembatan, irigasi serta pengembangan wilayah sebagai basis penyusunan rencana dan program untuk pembangunan berorientasi hasil yang tidak hanya menekankan *output* namun juga *outcome* dan *impact*.

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kami mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur ini dapat tercapai sehingga mensukseskan program Pemerintah Daerah terutama dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial.

Sukadana, 2024

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Timur**



C. SURYA EDI HW, S.KM.
NIP. 19671022 198701 1002





DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	56
4.1 Catatan Penting	56
4.2 Kaidah Pelaksanaan	56
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah). Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja

Tahap ini dilakukan dengan:

- a. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur;
- b. Melaksanakan orientasi mengenai Rencana Kerja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- c. Menyusun tata cara sebagai panduan kerja; dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pada tahap ini dilakukan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Edaran Bupati yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan tersebut mencakup perumusan rancangan Rencana Kerja dan penyajian rancangan Rencana Kerja.
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Penetapan Rencana Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan
 - II. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu
 - III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah
 - IV. PenutupRancangan akhir Rencana Kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Waykanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

1.3 Maksud dan Tujuan

Berikut adalah maksud dan tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur:

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode I (satu) tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Lampung Timur dan berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Tujuan

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun untuk:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Lampung Timur serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 melaksanakan 10 Program, 18 Kegiatan serta 53 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 2.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang

Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 3.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 4.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 5.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
6. Program Penataan Gedung
 - 6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - 7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Penyelenggaraan Jalan
 - 8.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 9.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 10.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat program, kegiatan maupun sub kegiatan dengan tingkat capaian rendah dikarenakan adanya pengajuan Surat Pembayaran Dana yang tidak disetujui oleh BPKAD dan terdapat pekerjaan-pekerjaan fisik yang pembayarannya masih terhutang . Sehingga anggaran belanja infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami pergeseran yang membuat tingkat capaian realisasi anggaran maupun target pada renja tidak mampu memenuhi target 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dilakukan berdasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun IKK yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berikut merupakan ketentuan dalam pengukuran kinerja utama dan pengukuran kinerja program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur tahun 2023.

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase (%)
1	2	3	4	
Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	68	49,17	72,3
Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Air yang Mantap	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Kondisi Baik	5	2,75	55
Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	Persentase Rumah Tangga Pengguna Sumber Air Minum Bersih	74	88,2	119,18
	Persentase Rumah Tangga berfasilitas tempat BAB	43	88,5	205,93
	Persentase Desa Yang Terlayani	10	26,89	268,94
Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	56	50,70	90,54

Tabel 2.3.
Pengukuran Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3
Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	68
Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Air yang Mantap	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Kondisi Baik	3
Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	Persentase Rumah Tangga Pengguna Sumber Air Minum Bersih	89
	Persentase Rumah Tangga berfasilitas tempat BAB	89
	Persentase Desa Yang Terlayani	30
Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	60

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan satu urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan 11 Program dan 22 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pada kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional untuk pelaksanaan teknis tugas pokok dan fungsi.
2. Belum tersusunnya basis data yang baik untuk indikator kinerja program/kegiatan.
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang berfokus kepada penanganan jalan kabupaten.
4. Pengendalian sistem manajemen mutu yang lemah.
5. Belum adanya inventarisasi kebutuhan pengadaan lahan untuk peningkatan pembangunan jalan dan jembatan.
6. Pemetaan lokasi rawan longsor serta bencana alam ruang milik jalan.
7. Terbatasnya jumlah alat berat/sarana prasarana pekerjaan umum, dan kondisi peralatan yang sudah tidak memadai.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih adanya sasaran program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di

bidang teknis berdampak pada standar pengendalian manajemen mutu dan pencapaian SPM dan SGDs, maupun RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa yang akan datang, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

1. Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyusunan basis data yang menyatu dalam dokumen perubahan rencana strategi sesuai dengan ketentuan dan peraturan terbaru.
3. Peningkatan anggaran untuk penanganan jalan kabupaten dan tetap memberi perhatian kepada infrastruktur di daerah terisolir dan tertinggal.
4. Peningkatan kinerja jasa konsultansi untuk perencanaan dan pengawasan pekerjaan.
5. Pemenuhan kriteria kesiapan lokasi pekerjaan.
6. Penguatan sistem dan mitigasi bencana terkait banjir dan longsor, dan kejadian alam yang memerlukan penanganan tanggap darurat
7. Revisi perda tentang alat berat dan rencana pengadaan dan peremajaan sarana dan prasarana pekerjaan umum

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah:

A. Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah

1. Sumber Daya Air

- Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi belum tersedia dengan baik
- Jaringan irigasi permukaan dalam kondisi rusak
- Bendung irigasi dalam kondisi rusak
- Masih kurangnya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Minimnya operasional Unit Pengelola Irigasi
- Minimnya pembinaan dan pemberdayaan pengelola SDA

- Perlu ditingkatkannya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sda
- Kurang optimalnya pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi

2. Sistem penyediaan air minum

- Belum *update*-nya rencana, kebijakan, strategi dan teknis spam
- Kurangnya pembangunan/ peningkatan spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan
- Tidak terpeliharanya spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan
- Pembangunan baru /peningkatan spam bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan

3. Sistem air limbah

- Belum *update*-nya rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota
- Belum tersedianya sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota/permukiman

4. Sistem drainase

- Belum tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan
- Kurangnya Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

5. Bangunan gedung

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- Masih adanya bangunan gedung daerah kabupaten yang belum terselesaikan pembangunannya
- Adanya Bangunan Gedung daerah kabupaten dalam kondisi rusak

6. Bangunan dan lingkungannya

- Belum tersusunannya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di semua wilayah kabupaten kota
- Belum optimalnya Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Belum tersedianya Database dan Keputusan Bupati tentang bangunan Gedung untuk dilindungi dan dilestarikan

7. Tingkat kemantapan jalan

- Belum tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Terbatasnya Personil tenaga teknis Dinas
- Leger Jalan belum dikelola dengan baik
- Masih banyaknya ruas jalan kabupaten yang belum standar lebarnya
- Pelaksanaan penanganan bencana alam dan mitigasi bencana pada pekerjaan jalan dan jembatan belum optimal
- Belum optimalnya pengelolaan asset jalan kabupaten
- Peningkatan Jalan dan Jembatan Masih terbatas penganggarnya
- Pemeliharaan jalan dan jembatan masih terbatas penganggarnya

8. Pengembangan jasa konstruksi

- Masih kurangnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Belum tersusunnya Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
- Belum tersusunnya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
- Belum Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir

9. Penataan ruang

- RTRW Kabupaten Belum selesai direvisi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada **Tabel 2.5.**

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				20.958.457.354	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				20.958.457.354	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.750.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.750.000.000	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sukadana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	1	1.500.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sukadana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	1	1.500.000.000	
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	100.000.000	
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	100.000.000	
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sukadana	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sukadana	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	50.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.599.013.641	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.599.013.641	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)	1	8.360.783.641	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)	1	8.360.783.641	
1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1.008.230.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1.008.230.000	
1 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	150.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	150.000.000	
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	20.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	20.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	20.000.000	
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	40.000.000	
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40.000.000	
1 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sukadana	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sukadana	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	
1 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	40.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	40.000.000	
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60.000.000	
1 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sukadana	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	60.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sukadana	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan (Orang)	1	60.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				554.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				554.000.000	
1 03 01 2.06 01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	9.000.000	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	9.000.000	
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	100.000.000	
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000	
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	200.000.000	
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	80.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	80.000.000	
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka (Kegiatan)	1	70.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka (Kegiatan)	1	70.000.000	
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Timur dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Timur dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	80.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.520.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				328.412.900	
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sukadana	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sukadana	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	278.412.900	
1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Sukadana	Jumlah Alat Besar yang Disediakan	5	6.100.000.000	Pengadaan Alat Besar	Sukadana	Jumlah Alat Besar yang Disediakan	1	50.000.000	
1 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Kegiatan)	1	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Kegiatan)	1	50.000.000	
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.524.443.713	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.524.443.713	
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.000.000	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dyaa Air dan Listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Tahun)	1	115.443.713	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dyaa Air dan Listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Tahun)	1	115.443.713	
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kegiatan)	1	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kegiatan)	1	30.000.000	
1 03 01 2.08 04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Tahun)	1	1.374.000.000	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Tahun)	1	1.374.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				911.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				911.000.000	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sukadana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Tahun)	1	596.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sukadana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Tahun)	1	596.000.000	
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Sukadana	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinanny (Tahun)	1	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Sukadana	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinanny (Tahun)	1	15.000.000	
1 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	300.000.000	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				4.360.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				4.360.000.000	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				260.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				260.000.000	
1 03 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang Diberdayakan (Kelompok)	70	260.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang Diberdayakan (Kelompok)	70	260.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.100.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.100.000.000	
1 03 02 2.02 35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pengairan (Dokumen)	1	365.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pengairan (Dokumen)	1	365.000.000	
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Lampung Timur	Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik (km)	2,5	2.435.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Lampung Timur	Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik (km)	2,5	2.435.000.000	
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Lampung Timur	Jumlah Daerah Irigasi Kondisi Baik (Kawasan)	1	1.100.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Lampung Timur	Jumlah Daerah Irigasi Kondisi Baik (Kawasan)	1	1.100.000.000	
1 03 02 2.02 34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Lampung Timur	Tersedianya Operasional UPT Pengairan (Tahun)	1	50.000.000	Operasi Unit Pengelola Irigasi	Lampung Timur	Tersedianya Operasional UPT Pengairan (Tahun)	1	50.000.000	
1 03 02 2.02 32	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Lampung Timur	Pengelolaan Alokasi Air Irigasi (Tahun)	1	150.000.000	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Lampung Timur	Pengelolaan Alokasi Air Irigasi (Tahun)	1	150.000.000	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				4.994.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				4.994.000.000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				4.994.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				4.994.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 03 2.01 22	Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Lampung Timur	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaa (Rumah Tangga)	920	2.100.000.000	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Lampung Timur	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaa (Rumah Tangga)	920	2.100.000.000	
1 03 03 2.01 25	Penyudunan Rencana , Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Lampung Timur	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (Dokumen)	1	25.000.000	Penyudunan Rencana , Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Lampung Timur	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (Dokumen)	1	25.000.000	
1 03 03 2.01 26	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Lampung Timur	Penyediaan Air Minum (Rumah Tangga)	400 Liter/detik	115.000.000	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Lampung Timur	Penyediaan Air Minum (Rumah Tangga)	40	115.000.000	
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Lampung Timur	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (Rumah Tangga)	400 Liter/detik	2.754.000.000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Lampung Timur	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (Rumah Tangga)	60	2.754.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				600.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				725.000.000	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota				600.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota				600.000.000	
1 03 05 2.01 22	Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman	Lampung Timur	Penyediaan Fasilitas BAB (Rumah Tangga)	60m3/hari	575.000.000	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Lampung Timur	Penyediaan Fasilitas BAB (Rumah Tangga)	1	575.000.000	
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Lampung Timur	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	25.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	25.000.000	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				703.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				703.500.000	
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				703.500.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				703.500.000	
1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Lampung Timur	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	9	703.500.000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Lampung Timur	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	9	703.500.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				4.996.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				4.996.000.000	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				4.996.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				4.996.000.000	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Lampung Timur	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dokumen)	190	150.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Lampung Timur	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dokumen)	190	150.000.000	
1 03 08 2.01 02	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	4.306.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	4.306.000.000	
1 03 08 2.01 12	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai (Unit)	6	540.000.000	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai (Unit)	6	540.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				5.322.500.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				5.322.500.000	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				5.322.500.000	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				5.322.500.000	
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Lampung Timur	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainny (Kawasan)		5.322.500.000	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Lampung Timur	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainny (Kawasan)		5.322.500.000	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				99.768.377.646	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				99.768.377.646	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				99.768.377.646	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				99.768.377.646	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	1	240.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	1	240.000.000	
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Lampung Timur	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	1	1.500.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Lampung Timur	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	1	1.500.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Lampung Timur	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (KM)	18	63.073.377.646	Pemeliharaan Berkala Jalan	Lampung Timur	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (KM)	18	63.073.377.646	
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Lampung Timur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (KM)	36	15.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Lampung Timur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (KM)	36	15.000.000.000	
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Lampung Timur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM)	3	2.108.000.000	Pembangunan Jembatan	Lampung Timur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM)	3	2.108.000.000	
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Lampung Timur	Panjang Jembatan yang Dibangun (M)	2	17.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Lampung Timur	Panjang Jembatan yang Dibangun (M)	2	17.000.000.000	
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Lampung Timur	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (M)	1	847.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Lampung Timur	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (M)	1	847.000.000	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.050.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.050.000.000	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				1.050.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				1.050.000.000	
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Lampung Timur	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	90	550.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	90	550.000.000	
1 03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Lampung Timur	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi (Orang)	60	500.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi (Orang)	60	500.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.717.165.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.717.165.000	
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.717.165.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.717.165.000	
1 03 12 2.03 05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dokumen)	30	1.717.165.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dokumen)	30	1.717.165.000	
Jumlah					144.470.000.000	Jumlah					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pada kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional untuk pelaksanaan teknis tugas pokok dan fungsi.
2. Belum tersusunnya basis data yang baik untuk indikator kinerja program/kegiatan.
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang berfokus kepada penanganan jalan kabupaten.
4. Pengendalian sistem manajemen mutu yang lemah.
5. Belum adanya inventarisasi kebutuhan pengadaan lahan untuk peningkatan pembangunan jalan dan jembatan.
6. Pemetaan lokasi rawan longsor serta bencana alam ruang milik jalan.
7. Terbatasnya jumlah alat berat/sarana prasarana pekerjaan umum, dan kondisi peralatan yang sudah tidak memadai.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih adanya sasaran program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di

bidang teknis berdampak pada standar pengendalian manajemen mutu dan pencapaian SPM dan SGDs, maupun RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa yang akan datang, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

1. Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyusunan basis data yang menyatu dalam dokumen perubahan rencana strategi sesuai dengan ketentuan dan peraturan terbaru.
3. Peningkatan anggaran untuk penanganan jalan kabupaten dan tetap memberi perhatian kepada infrastruktur di daerah terisolir dan tertinggal.
4. Peningkatan kinerja jasa konsultansi untuk perencanaan dan pengawasan pekerjaan.
5. Pemenuhan kriteria kesiapan lokasi pekerjaan.
6. Penguatan sistem dan mitigasi bencana terkait banjir dan longsor, dan kejadian alam yang memerlukan penanganan tanggap darurat
7. Revisi perda tentang alat berat dan rencana pengadaan dan peremajaan sarana dan prasarana pekerjaan umum

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah:

A. Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah

1. Sumber Daya Air

- Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi belum tersedia dengan baik
- Jaringan irigasi permukaan dalam kondisi rusak
- Bendung irigasi dalam kondisi rusak
- Masih kurangnya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Minimnya operasional Unit Pengelola Irigasi
- Minimnya pembinaan dan pemberdayaan pengelola SDA

- Perlu ditingkatkannya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sda
- Kurang optimalnya pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi

2. Sistem penyediaan air minum

- Belum *update*-nya rencana, kebijakan, strategi dan teknis spam
- Kurangnya pembangunan/ peningkatan spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan
- Tidak terpeliharanya spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan
- Pembangunan baru /peningkatan spam bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan

3. Sistem air limbah

- Belum *update*-nya rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota
- Belum tersedianya sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota/permukiman

4. Sistem drainase

- Belum tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan
- Kurangnya Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

5. Bangunan gedung

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- Masih adanya bangunan gedung daerah kabupaten yang belum terselesaikan pembangunannya
- Adanya Bangunan Gedung daerah kabupaten dalam kondisi rusak

6. Bangunan dan lingkungannya

- Belum tersusunannya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di semua wilayah kabupaten kota
- Belum optimalnya Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Belum tersedianya Database dan Keputusan Bupati tentang bangunan Gedung untuk dilindungi dan dilestarikan

7. Tingkat kemantapan jalan

- Belum tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Terbatasnya Personil tenaga teknis Dinas
- Leger Jalan belum dikelola dengan baik
- Masih banyaknya ruas jalan kabupaten yang belum standar lebarnya
- Pelaksanaan penanganan bencana alam dan mitigasi bencana pada pekerjaan jalan dan jembatan belum optimal
- Belum optimalnya pengelolaan asset jalan kabupaten
- Peningkatan Jalan dan Jembatan Masih terbatas penganggarannya
- Pemeliharaan jalan dan jembatan masih terbatas penganggarannya

8. Pengembangan jasa konstruksi

- Masih kurangnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Belum tersusunnya Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
- Belum tersusunnya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
- Belum Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir

9. Penataan ruang

- RTRW Kabupaten Belum selesai direvisi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada **Tabel 2.5.**

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses *E-planning* dan *E-Pokir*.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tugasnya yaitu sebagai membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar pedoman di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Penyediaan dukungan/bantuan untk kerjasama antar kecamatan dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah;
3. Penyediaan dukungan/bantuan untuuk pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
4. Pemberian rekomendasi atas pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan, irigasi dan seluruh aset dibidang pekerjaan umum;
5. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya, jalan dan jembatan berserta simpul-simpulnya;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dalam pengelolaan atas air atau sumber-sumber air, jalan dan jembatan;
7. Perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sumber daya air, jalan dan jembatan;
8. Pengelolaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yaitu **“Rakyat Lampung Timur Berjaya”**. Sedangkan misi nya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Program Petani Berjaya
- b. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
- c. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan Kesehatan, Pendidikan, keagamaan, dan social kemasyarakatan
- d. Meningkatkan peran korupsi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi local
- e. Meningkatkan Pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat
- f. Meningkatkan *good governance* (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
- g. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan lokal
- h. Meningkatkan penanganan pandemic penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana
- i. Meningkatkan tata Kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Rancangan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 memiliki tema yaitu **“Melanjutkan Pembangunan SDM, Ekonomi Infrastruktur dan Pelayanan Publik untuk Penguatan Fondasi Transformasi Daerah Berkelanjutan”**

- . Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan Kualitas SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi;
 - Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Daerah Berkelanjutan;
 - Memantapkan Infrastruktur Mendukung Peningkatan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
 - Meningktkan layanan SPM, Penanggulangan Kemiskinan, Prevalensi Stunting dan Perlindungan Sosial Masyarakat;
 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas dan Merata;
 - Membangun Keluarga Berkualitas, Perlindungan Anak dan Perempuan, serta Pemuda dan Olahraga;
 - Melestarikan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;

Tabel 3.3
Rancangan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

No.	Indikator Capaian Daerah	2022 (<i>Baseline</i>)	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,44	73,97
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	3
3	LPE Non Migas (%)	5,20	5,2
4	LPE Migas (%)	2,02	3,02
5	PDRB per Kapita (juta/th)	44,15	46,5
6	Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	47,29	52
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,16	64,5
8	Tingkat Kemiskinan	13,8	12,36
9	Prevelensi Stunting	18,1	15,3

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Pada tahun 2019, Bupati Lampung Timur telah mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan review terhadap renstra OPD dan merefokuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Arah kebijakan pembangunan untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 yaitu:

- Pemenuhan SPM Bidang PUPR
- Peningkatan Konektivitas wilayah
- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
- Penyelesaian RTRW/RDTR serta Penegndalian Pemanfaatan Ruang
- Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung secara Tertib dan Handal

Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu:

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merumuskan program dan kegiatan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

- Pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yaitu aspek pelayanan umum, fokus layanan urusan wajib, bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan indikator kinerja pembangunan Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar 50%.
- Pencapaian Sustain Development Goals
Sebagai kesepakatan pembangunan global, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempertimbangkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :
 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
 3. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
 4. Mengurangi Kesenjangan
 5. Membangun Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bidang

Urusan Pekerjaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari dua jenis pelayanan dasar, yaitu :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan
 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya yang berbasis agribisnis, untuk mendukung hal itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan fokus pada penyediaan infrastruktur jalan untuk prasarana transportasi logistik dan kegiatan ekonomi serta penyediaan irigasi pertanian untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan.
 - Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dan penyediaan infrastruktur yang tangguh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan membangun prasarana dasar transportasi dengan strategi untuk mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan mengurangi ketertinggalan daerah-daerah terisolir.

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 mencakup 10 program yang terdiri 18 kegiatan serta 53 Sub Kegiatan.

Tabel 3.5
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2023

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						144.470.000.000,00							150.541.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						138.370.000.000,00							144.441.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						138.370.000.000,00							144.441.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	76.61 %			76.61 %	14.858.457.354,00						76.61 %	14.727.457.354,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja (Laporan)	-			19 Laporan	1.750.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Kabupaten Lampung Timur	-	1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	Kabupaten Lampung Timur		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Kabupaten Lampung Timur		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memantapk an infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan administrasi keuangan	-			6 Kegiatan	9.599.013.641,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	9.599.013.641,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/bulan	8.360.783.641,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		8.360.783.641,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.008.230.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		1.008.230.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur	Kabupaten Lampung Timur		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Barang Milik Daerah	-			2 Kegiatan	40.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur	-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian (orang)	-			132 Pegawai	60.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur	-	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	-			7 Kegiatan	554.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memantapka n infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	554.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	100.000.000,00	-	-	-	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			4 Kegiatan	1.524.443.713,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	1.393.443.713,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	115.443.713,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		115.443.713,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.374.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		1.243.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			3 Kegiatan	911.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	811.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	596.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		596.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi permukaan kondisi baik Luas jaringan irigasi permukaan kewenangandaerah yang dibangun Persentase luas sawah beririgasi	15 % 200 Ha 200 Ha 54 %			12 % 150 Ha 53 %	4.360.000.000,00						15 % 200 Ha 200 Ha 54 %	4.360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				3 KM	2.435.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		2.435.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				50 KM	1.100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi														
			<i>Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya</i>				58 DI	150.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														
			<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi</i>				1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			<i>0</i>				0 0	365.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Lampung Timur		365.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Indeks kategori kinerja PDAM Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	99 % 79,2 % 2,95 % 10 %			2,9 % 79 % 8 % 98,88 %	4.994.000.000,00						99 % 79,2 % 2,95 % 10 %	5.094.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga pengguna sumber air minum bersih	-			1720 Rumah Tangga	4.994.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	5.094.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				920 Unit	2.100.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				400 Liter/Detik	115.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		115.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				400 Liter/Detik	2.754.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		2.754.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	50 %			50 %	600.000.000,00						50 %	600.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas BAB	-			60 Rumah Tangga	600.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				60 M³/Hari	575.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		575.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang jalan kabupaten berdrainase (TPB)	30 %			30 %	703.500.000,00						30 %	703.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kawasan Bebas Genangan (%)	-			8 %	703.500.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	-	-	703.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	703.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	-		703.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan rumah berIMB/PBG	40 %			40 %	4.996.000.000,00						40 %	4.996.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Tertangani	-			11 Unit	4.996.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	4.996.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				8 Bangunan Gedung	540.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4.306.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		4.306.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				8 Kawasan	5.322.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infracstruktur Memantapk an infracstruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		5.322.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Persentase jembatan dalam kondisi baik	75 % 92 %			73 % 89 %	99.768.377.646,00						75 % 92 %	105.870.377.646,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	-			145.8 KM	99.768.377.646,00			Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infracstruktur Memantapk an infracstruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	105.870.377.646,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				74 KM	63.073.377.646,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		74.175.377.646,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				15 KM	15.000.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				10 Jembatan	847.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		847.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				4 Jembatan	17.000.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1 KM	1.500.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur	Kabupaten Lampung Timur		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0.8 KM	2.108.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		2.108.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase cakupan jasa konstruksi terfasilitasi	55 %			55 %	1.050.000.000,00						55 %	1.050.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	1.050.000.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur	-	1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				60 Orang	500.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>				165 Orang	550.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	Kabupaten Lampung Timur		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Pemanfaatan ruang sesuai RTRW</i>	60 %			60 %	1.717.165.000,00						60 %	1.717.165.000,00	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.717.165.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	-	-	1.717.165.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>				1 Dokumen	1.717.165.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Memantapk an infrastruktur mendukung peningkata n ekonomi & pelayanan dasar	-		1.717.165.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	X	NON URUSAN						6.100.000.000,00							6.100.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						6.100.000.000,00							6.100.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah</i>	76.61 %			76.61 %	6.100.000.000,00						76.61 %	6.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	-			18 Unit	6.100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	-	-	6.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	X.XX.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				5 Unit	6.100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar	-		6.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H							144.470.000.000,00							150.541.000.000,00	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 – 2026.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2025 Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 10 program, 18 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar **Rp 144.470.000.000** (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Timur yang telah ditetapkan

pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RANWAL RENJA) 2026



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**

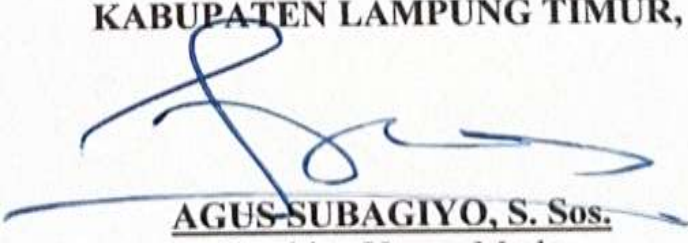
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kita sehingga sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan memuat rencana kegiatan pembangunan melalui Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026, dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu – isu yang dapat segera ditangani dalam upaya menjabarkan Visi, Misi dan program kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini. Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik

Sukadana,

2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



AGUS SUBAGIYO, S. Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199003 1 012

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Sosial.....	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Lampung Timur dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

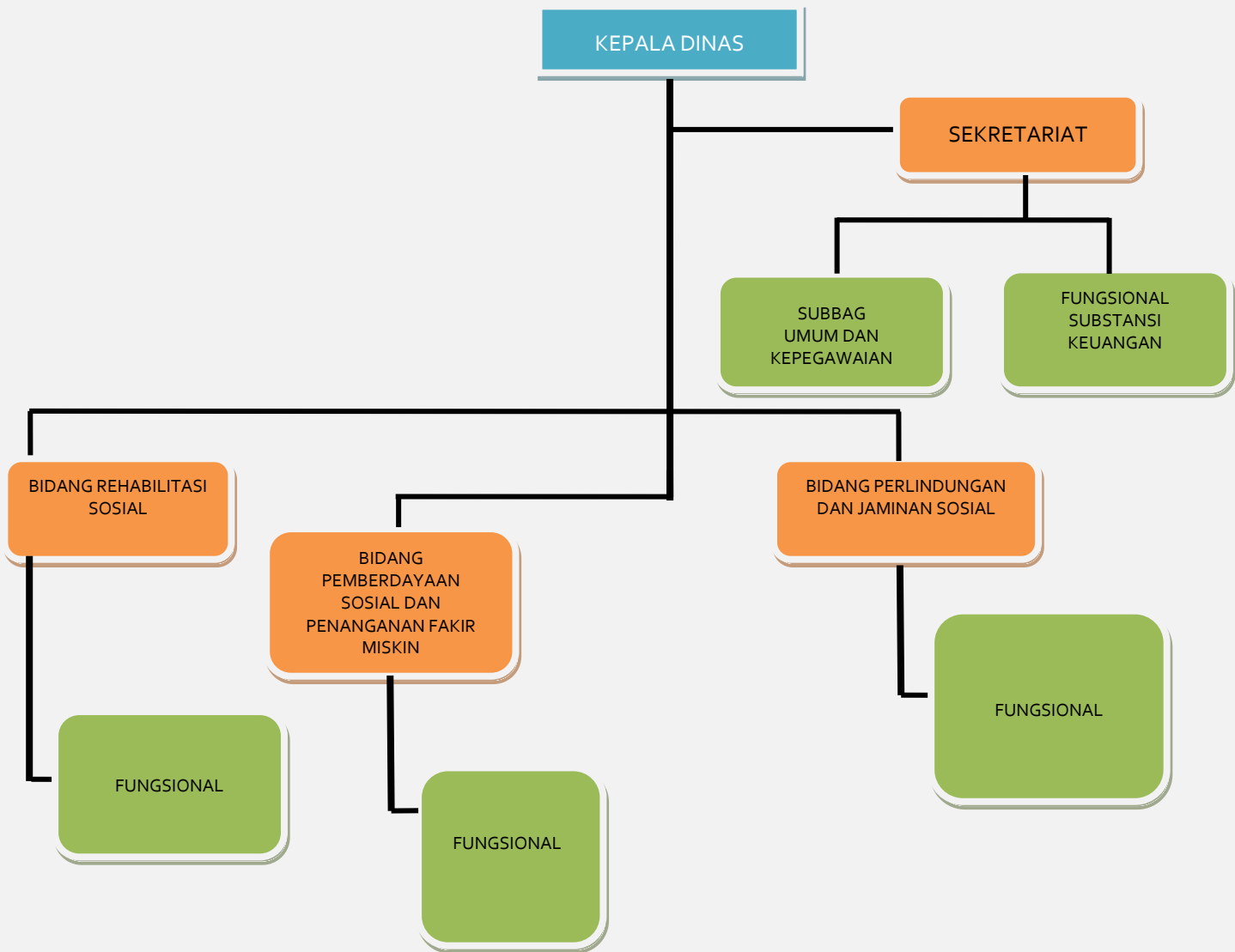
Renja Dinas Sosial juga berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri dari :
 - Subbag umum dan Kepegawaian
 - Fungsional Substansi Keuangan
- c. Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

f. Jabatan fungsional

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur adalah sebagaimana disajikan dalam bagan 1.1.sebagai berikut :

Bagan 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SESUAI PERATURAN
BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 81 TAHUN 2021



1.1. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Rancangan Awal RENJA Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjiwai keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadaan tertentu;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana Tagana (TAGANA);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021)
25. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur
26. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor 035/LJS.JS.SV/01/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Pengembangan PKH di Provinsi Pelaksana PKH tahun 2014;

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan Renja

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, sehingga program/ kegiatan/ sub kegiatan berjalan secara sistematis, efektif dan efisien selama tahun anggaran 2024. Selain dari pada itu penyusunan Rancangan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur ini adalah untuk menyusun Rencana Kerja / Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2025, dengan memadukan penjabaran RKPD dengan Renstra SKPD yang memuat rancangan dalam bidang sosial, pada program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dan rencana kerja dan pendanaan.

b. Tujuan Penyusunan Renja

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur
2. Sebagai pedoman atau acuan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan selama tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan konsisten untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik.
3. Menjamin Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.
5. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Renja ini disusun dalam empat bab, sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan**, berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.
- BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu**, berisi evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah; analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah; dan penelaahan usulan program dan kegiatan.
- BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, Program dan Kegiatan.
- BAB IV Penutup**, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebagai pelaksana teknis pembangunan urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 8.111.589.278,- Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebesar 91,38 % dengan realisasi dana sebesar Rp. 7.412.522.379,- .

Berikut Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 s/d Triwulan IV (Desember 2024) dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur
s/d Triwulan IV (Desember 2024)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.858.409.278	4.377.580.936	90,10
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.520.875	30.572.500	94,01
	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	7,847,514	7,337,400	93,50
	2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,379,027	7,875,700	93,99
	3. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8,106,855	7,630,500	94,12
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,187,479	7,728,900	94,40
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.563.302.667	3.242.591.574	91,00
	1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3,380,615,348	3,078,537,474	91,06
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141,279,125	126,728,700	89,70
	3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	31,920,000	28,500,000	89,29
	4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	9,488,194	8,825,400	93,01

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,960,000	12,540,000	62,83
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,960,000	12,540,000	62,83
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.090.216	230.390.635	71.09
	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000	13,277,500	88,52
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	41,000,000	21,533,800	52,52
	3. Penyediaan peralatan rumah tangga	15,000,000	13,728,100	91,52
	4. Penyediaan bahan logistik kantor	20,000,000	6,508,800	32,54
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41,060,136	27,048,000	65,87
	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000	9,900,000	99,00
	7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	182,030,080	138,394,435	76,03
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.425.520	653.050.697	96,69
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61,400,000	41,058,557	66,87
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	9,195,000	91,95
	3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	604,025,520	602,797,140	99,80
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.110.000	208.435.530	85,74
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	217,000,000	193,729,530	89,28
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26,110,000	14,706,000	56,32
II	Program Pemberdayaan Sosial	1.580.000.000	1.487.392.217	94,14
8.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.580.000.000	1.487.392.217	94,14
	1. Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	472,000,000	471,198,600	99,83
	2. Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	783,000,000	750,134,685	95,80
	3. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	325,000,000	266,058,932	81,86
III	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	15.000.0000	-	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
9.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	15.0000.000	-	0
	1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	15.0000.000	-	0
10	Program Rehabilitasi Sosial	905.400.000	904.222.700	99,87
IV	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	530.500.000	445.196.327	83,92
	1. Penyediaan Permakanan	82,000,000	77,402,701	94,39
	2. Penyediaan Sandang	60,000,000	59,461,100	99,10
	3. Penyediaan Alat Bantu	318,500,000	308,332,526	96,81
	4. Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	70,000,000		
11.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	456,680,000	439,082,685	96,15
	1 Pemberian Layanan Rujukan	456,680,000	439,082,685	96,15
V	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	246.000.000	245.314.514	97,72
12.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	246.000.000	245.314.514	97,72
	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	25,000,000	24,417,090	97,67
	2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	221,000,000	220,897,424	99,95
VI.	Program Penanganan Bencana	325.000.000	320.	98,49
13.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	300.440.000	300.173.200	99,59
	1. Penyediaan Makanan	207,800,000	206,943,100	99,59
14.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupate/Kota	117,200,000	113,150,300	96,54
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	117,200,000	113,150,300	96,54
VII	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100.000.000	97.682.300	97,86
15.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100.000.000	97.682.300	97,86
	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40,000,000	38,088,900	95,22
	2. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60,000,000	59,773,400	99,62
Jumlah		8.111.589.278	7.412.522.379	91,38

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024, dapat dilihat sebagaimana table berikut

1.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun ke keempat masa periode RPJMD, untuk menghitung kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 di perlukan data valid dari realisi kinerja tahun 2025. Sampai dengan Rencana kerja disusun, belum dapat di hitung secara valid dan actual data realisasi kinerja 2024, Periode RPJMD 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mendukung program-program prioritas bupati melalui **MISI 3** yakni ***“Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan”***

Dari penjabaran misi Program Kepala Daerah dituangkan dalam satu tujuan dua sasaran yang sudah dituangkan dalam Renstra tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. TUJUAN

Meningkatkan layanan sosial masyarakat
2. SASARAN
 - a. Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenangan Kabupaten yang aktif
 - b. Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Berikut diuraikan Analisis Kinerja Pelayanan PD pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur melalui MISI 3 Program Kepala Daerah, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai tabel berikut:

Tabel 2.2.1
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja pada tahu ke-					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenangan Kabupaten yang aktif	Persentase Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenagan Kabupaten yang aktif	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	22,88	23,57	24,28	25,02	25,78	26,56

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dinas Sosial.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mempunyai pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan terdapat beberapa isu penting dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada beberapa hal :

NO	ISU STRATEGIS RENSTRA (2021 -2026)	ISU STRATEGIS TAHUN 2024
1	2	3
1.	Optimalisasi peningkatan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial.
2.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masalah sosial	
3.	Meningkatkan kemandirian peserta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan pemberian Edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD terdapat program prioritas dalam pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dibandingkan dengan capaian pelaksanaan tahun lalu dan diharapkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah daerah dapat mengentaskan atau pengurangan tingkat kemiskinan.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial, Rivew ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan, sebagaimana penjelasan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Lampung Timur

Nama PD : DINAS SOSIAL

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)</i>	<i>100%</i>	<i>5.051.269.894</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah</i>	<i>100%</i>	<i>5.387.559.292</i>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	12 bulan	32.520.875	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	12 bulan	32.520.875	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dinas sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7,847,514	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dinas sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7,847,514	
2.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8,379,027	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8,379,027	
3.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8,106,855	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8,106,855	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	8.187.479	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	8.187.479	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sukadana	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.824.198.417	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sukadana	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.852.038.417	
1.	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 org/bulan	3.667.550.223	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 org/bulan	3.667.550.223	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	112.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	135.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan				Pagu Indikatif (Rp.000)	Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	25.080.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	30.000.000	
4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9.488.194	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9.488.194	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sukadana	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sukadana	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 laporan	10.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sukadana	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	12 bulan	16.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	5 laporan	25.000.000	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	16.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	25.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan				Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sukadana	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	159.685.602	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	255.000.000	
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	9.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	15.000.000	
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	25.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	40.000.000	
3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 paket	15,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 paket	25,000,000	
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	15,000,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	25,000,000	
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	23.685.602	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	40,000,000	
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1 dokumen	5.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1 dokumen	10.000.000	

	perundang-undangan		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			peraturan perundang-undangan		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	67.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	100.000.000	
8.	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sukadana	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	50.000.000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sukadana	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	782.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	733.000.000	
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	55.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	60.000.000	
2.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	8.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	13.000.000	
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	665.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	700.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	12 bulan	240.865.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Sukadana	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan	400.000.000	

			Pemerintahan Daerah			Daerah		Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sukadana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	215.865.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sukadana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	300.000.000	
2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	25.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	100.000.000	
II	Program Pemberdayaan Sosial	Lampung Timur	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	100%	575.000.000	Program Pemberdayaan Sosial	Sukadana	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	100%	1.150.000.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (TPB)	100%	575.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	1.150.000.000	
1.	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	54.685 keluarga	45.000.000	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	54.685 keluarga	100.000.000	
2.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	20 lembaga	45.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	20 lembaga	100.000.000	

3.	Fasilitasi pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan	Lampung Timur	Jumlah wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	20 orang	30.000.000	Fasilitasi pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan	Lampung Timur	Jumlah wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	20 orang	50.000.000	
4.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social perseorangan kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial masyarakat dan/atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	24 orang	250.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social perseorangan kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial masyarakat dan/atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	24 orang	500.000.000	
III.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Lampung Timur	Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)	100 %	5.000.000	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Lampung Timur	Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)	100 %	30.000.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan soial	20 orang	5.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan soial	25 orang	30.000.000	
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke	Lampung Timur	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di	20 orang	5.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk	Lampung Timur	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di	25 orang	30.000.000	

	Desa/Kelurahan Asal		Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			
IV.	Program Rehabilitasi Sosial	Lampung Timur	Presentase Penyandang disabilitas terlantar dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%) (SPM) (TPB)	100 %	770.000.000	Program Rehabilitasi Sosial	Lampung Timur	Presentase Penyandang disabilitas terlantar dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%) (SPM) (TPB)	100 %	1.430.000.000	
	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan Penyandang disabilitas, anak terlantar, anak stunting, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merima bantuan di Luar Panti Sosial	100 %	470.000.000	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan Penyandang disabilitas, anak terlantar, anak stunting, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merima bantuan di Luar Panti Sosial	100 %	930.000.000	
1.	Penyediaan Permakanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	75.000.000	Penyediaan Permakanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	160 orang	150.000.000	

2.	Penyediaan sandang	Lampung Timur	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	75 orang	60.000.000	Penyediaan sandang	Lampung Timur	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	160 orang	150.000.000	
3.	Penyediaan Alat Bantu	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 orang	300.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	23 orang	400.000.000	
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	5.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30.000.000	
5.	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	Lampung Timur	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	Lampung Timur	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	50.000.000	
1.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Lampung Timur	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia	15 orang	5.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	Lampung Timur	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia	35 orang	30.000.000	

			Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Masyarakat		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
3.	Pemberian layanan data dan pengaduan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian layanan data dan pengaduan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
4.	Pemberian layanan kedaruratan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian layanan kedaruratan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)	30 orang	300.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)	30 orang	500.000.000	

1.	Pemberian layanan rujukan	Lampung Timur	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	35 orang	300.000.000	Pemberian layanan rujukan	Lampung Timur	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	35 orang	500.000.000	
V.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lampung Timur	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)	100%	315.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lampung Timur	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)	100%	185.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Cakupan PMKS yang difasilitasi	100%	315.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Cakupan PMKS yang difasilitasi	100%	185.000.000	
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	513.535 orang	15.000.000,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		35.000.000,00	
2.	Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur			30.000.000	Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur			50.000.000	
3.	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	40.000.000	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		100.000.000	
4.	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah usulan penindaklayakan, usulan yang terverifikasi dan tervalidasi dan usulan perbaikan yang dilaksanakan	513.535 usulan	230.000.000	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah usulan penindaklayakan, usulan yang terverifikasi dan tervalidasi dan usulan perbaikan yang dilaksanakan	513.535 usulan	0	

<i>VI</i>	<i>Program Penanganan Bencana</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)</i>	<i>orang</i>	<i>315.000.000</i>	<i>Program Penanganan Bencana</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)</i>	<i>965 orang</i>	<i>590.000.000</i>	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard	orang	215.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard	Orang	440.000.000	
1.	Penyediaan Makanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	200.000.000	Penyediaan Makanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350.000.000	
2.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Lampung Timur	Junlah orang yang mendapatkan Penanganan khusus bagi kelompok rentan Kewenangan Kabupateb/Kota	10 orang	5.000.000	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Lampung Timur	Junlah orang yang mendapatkan Penanganan khusus bagi kelompok rentan Kewenangan Kabupateb/Kota	Orang	30.000.000	
3.	Pelayanan dukungan psikososial	Lampung Timur	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupateb/Kota	10 orang	5.000.000	Pelayanan dukungan psikososial	Lampung Timur	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupateb/Kota	Orang	30.000.000	

4.	Penyimpanan tempat penampungan pengungsi	Lampung Timur	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	10 orang	5.000.000	Penyimpanan tempat penampungan pengungsi	Lampung Timur	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		30.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	org	100.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	Org	150.000.000	
1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	57 org	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	org	150.000.000	
VII.	<i>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)</i>	<i>100 %</i>	<i>98.000.000</i>	<i>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</i>	<i>Lampung Timur</i>	<i>Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)</i>	<i>100 %</i>	<i>140.000.000</i>	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan	100 %	98.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan	100 %	140.000.000	
1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	2 dok	40.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan	dok	80.000.000	

			Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
2.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6 laporan	58.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	laporan	60.000.000	
Jumlah					7.129.269.894					8.912.559.292	

2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) DINAS SOSIAL Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya Dinas Sosial. Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Tahun 2026 didasarkan kepada RKPD DINAS SOSIAL Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur akan menampung usulan dari masyarakat melalui proses pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan. yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Timur. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2026. Mengenai daftar usulan dari para stakeholders (masyarakat) terkait pelayanan bidang kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Bantuan Kursi Roda dan Kaki tangan palsu untuk penyandang disabilitas
2.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Permakanan	Bantuan Permakanan untuk Lanjut Usia dan Anak Terlantar.
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
3.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Bantuan pakaian bagi Penyandang Disabilitas, Anak dan Lansia
4.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Bantuan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ)
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantuan permakanan untuk anak stunting
6.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan usaha dan pelatihan untuk KPM yang tergraudasi.

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020–2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005–2025. RPJMN 2020–2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2025 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan

peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin pemerataan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, dan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental merupakan gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negarabangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni:

(1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional untuk Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mengampu pada **Agenda Pembangunan RPJMN Ke 3 yaitu *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing***

Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. contohnya :

1. Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). PKH adalah program bantuan tunai untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan syarat dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan PKH adalah membantu KPM menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya sehat, serta dapat menyelesaikan pendidikan. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Pemberdayaan Sosial; Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada Sub kegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk membantu mengentaskan kemiskinan, bantuan yang diberikan berbentuk tunai.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kotapada Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Bantuan permakanan untuk Lanjut Usia (Lansia), bantuan paket sembako, tujuan penyaluran bantuan permakanan ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk menambah asupan gizi sebagai upaya meningkatkan imunitas lansia yang hidup dalam kemiskinan. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Rehabilitasi Sosial; Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sub kegiatan Penyediaan Permakanan.
4. Penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas, bantuan yang diberikan berupa kursi roda dan kaki tangan palsu, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian para penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari ataupun berkarya, sehingga secara otomatis akan semakin meningkatkan pemberdayaan dirinya dalam kehidupan bersosial. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Rehabilitasi Sosial; Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu.

Isu strategis nasional yang akan ditangani untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2025, antara lain meliputi:

- a. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan;
- c. penanggulangan Pengangguran yang disertai Decon Job;
- d. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
- e. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dalam Rangka Mendorong Produktivitas.
- f. Ekonomi Hijau.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan diarahkan: Pertama: SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. Kedua: Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada

peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah. Ketiga: Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,6 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5–5 persen;
3. Tingkat Kemiskinan 7–8 persen;
4. Rasio Gini 0,379–0,382;
5. Indeks Modal Manusia 0,56;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 38,6 persen;
7. Nilai Tukar Petani 113-115;
8. Nilai Tukar Nelayan 104-100.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 mendukung Misi ke-3 **“Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan”**. Berikut tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 dan Renstra Dinas Sosial 2021-2026:

a. Tujuan :

Meningkatkan layanan sosial masyarakat

b. Sasaran

a. Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kewenangan Kabupaten yang aktif

b. Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai tersebut berpedoman terhadap RPJMD, Renstra dan RKPD sehingga diharapkan adanya keserasian dan keselarasan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur

Misi 3: Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelay kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan layanan sosial masyarakat	Meningkatnya Kualitas Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kewenangan Kabupaten yang aktif	100
		Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	26,56

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah : Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD yang berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan yang mengacu pada RPPJPD untuk keselarasan program/kegiatan pembangunan yang kerkelanjutan
- b. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur untuk tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi kepala bidang sertakepala seksi masing-masing terdiri dari 7 (tujuh) Program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pemberdayaan Sosial

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota :

- Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal :

- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

4) Program Rehabilitasi Sosial

a. Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial:

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak
- Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar
- Pemberian layanan data dan pengaduan
- Pemberian layanan kedaruratan
- Pemberian layanan penelusuran keluarga

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial :

- Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar panti
- Pemberian Layanan Rujukan

5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

6) Program Penanganan Bencana

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan tempat penampungan pengungsi
- Penanganan khusus bagi kelompok rentan
- Pelayanan dukungan psikososial

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupate/Kota

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Lokasi Program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, berdasarkan pada sebaran Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) di tempat tersebut, dengan kriteria untuk segera mendapat penanganan. Sehubungan hal tersebut dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, dibutuhkan **dana sebesar Rp. 7.857.000.000 (Tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah)**, yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur.

Rumusan Program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 telah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jumlah program/kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu indikatif Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025, secara jelas dapat dilihat pada table 3.1 :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026

Nama OPD : DINAS SOSIAL

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)</i>	<i>100%</i>	<i>5.051.269.894</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah</i>	<i>100%</i>	<i>5.387.559.292</i>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	12 bulan	32.520.875	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	12 bulan	32.520.875	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dinas sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7,847,514	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dinas sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7,847,514	
2.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8,379,027	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8,379,027	
3.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8,106,855	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8,106,855	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	8.187.479	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	8.187.479	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sukadana	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.824.198.417	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sukadana	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.852.038.417	
1.	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 org/bulan	3.667.550.223	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Sukadana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 org/bulan	3.667.550.223	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	112.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sukadana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	135.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	25.080.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Sukadana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	30.000.000	
4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9.488.194	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	9.488.194	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sukadana	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sukadana	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 laporan	10.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sukadana	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	12 bulan	16.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	5 laporan	25.000.000	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	16.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	25.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan				Pagu Indikatif (Rp.000)	tan Pent ing
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sukadana	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	159.685.602	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	255.000.000	
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	9.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	15.000.000	
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	25.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	40.000.000	
3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 paket	15,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sukadana	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 paket	25,000,000	
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	15,000,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Sukadana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	25,000,000	
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	23.685.602	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sukadana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 paket	40,000,000	
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 dokumen	5.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sukadana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 dokumen	10.000.000	

			Disediakan					Disediakan			
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	67.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sukadana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	100.000.000	
8.	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sukadana	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	50.000.000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sukadana	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	782.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	733.000.000	
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	55.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	60.000.000	
2.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	8.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	13.000.000	
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	665.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sukadana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	700.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	240.865.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	400.000.000	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Sukadana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	10 unit	215.865.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Sukadana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	10 unit	300.000.000	

	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	25.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	100.000.000	
II	Program Pemberdayaan Sosial	Lampung Timur	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	100%	575.000.000	Program Pemberdayaan Sosial	Sukadana	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (%) (TPB)	100%	1.150.000.000	

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi (TPB)	100%	575.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	1.150.000.000	
1.	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	54.685 keluarga	45.000.000	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	54.685 keluarga	100.000.000	
2.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	20 lembaga	45.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	20 lembaga	100.000.000	
3.	Fasilitasi pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan	Lampung Timur	Jumlah wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan	20 orang	30.000.000	Fasilitasi pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan	Lampung Timur	Jumlah wakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda	20 orang	50.000.000	

	janda/duda perintis kemerdekaan		yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial			janda/duda perintis kemerdekaan		perintis kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial			
4.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social perseorangan kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial masyarakat dan/atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	24 orang	250.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social perseorangan kewenangan kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial masyarakat dan/atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	24 orang	500.000.000	
III.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Lampung Timur	Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)	100 %	5.000.000	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Lampung Timur	Cakupan warga negara migran terfasilitasi (%)	100 %	30.000.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan sosial	20 orang	5.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah warga negara migran pemulangan dan masa adaptasi dengan masyarakat/ lingkungan sosial	25 orang	30.000.000	
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	5.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Lampung Timur	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	30.000.000	
IV.	Program Rehabilitasi Sosial	Lampung Timur	Presentase Penyandang disabilitas terlantar	100 %	770.000.000	Program Rehabilitasi Sosial	Lampung Timur	Presentase Penyandang disabilitas terlantar	100 %	1.430.000.000	

			<i>dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%) (SPM) (TPB)</i>					<i>dan penyakit sosial lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%) (SPM) (TPB)</i>			
	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan Penyandang disabilitas, anak terlantar, anak stunting, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merima bantuan di Luar Panti Sosial	100 %	470.000.000	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan Penyandang disabilitas, anak terlantar, anak stunting, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merima bantuan di Luar Panti Sosial	100 %	930.000.000	
1.	Penyediaan Permakanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	75.000.000	Penyediaan Permakanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	160 orang	150.000.000	
2.	Penyediaan sandang	Lampung Timur	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	75 orang	60.000.000	Penyediaan sandang	Lampung Timur	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	160 orang	150.000.000	
3.	Penyediaan Alat Bantu	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	15 orang	300.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	23 orang	400.000.000	

			Kewenangan Kabupaten/ Kota					Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota			
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	5.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30.000.000	
5.	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	Lampung Timur	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial	Lampung Timur	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	50.000.000	
1.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Lampung Timur	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Lampung Timur	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
2.	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
3.	Pemberian layanan data dan pengaduan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan	15 orang	5.000.000	Pemberian layanan data dan pengaduan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	35 orang	30.000.000	

			pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
4.	Pemberian layanan kedaruratan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian layanan kedaruratan	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	5.000.000	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Lampung Timur	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	30.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)	30 orang	300.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Lampung Timur	Cakupan (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang Mandiri)	30 orang	500.000.000	
1.	Pemberian layanan rujukan	Lampung Timur	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	35 orang	300.000.000	Pemberian layanan rujukan	Lampung Timur	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	35 orang	500.000.000	
V.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lampung Timur	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)	100%	315.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lampung Timur	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) (TPB)	100%	185.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Cakupan PMKS yang difasilitasi	100%	315.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Cakupan PMKS yang difasilitasi	100%	185.000.000	
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	513.535 orang	15.000.000,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Timur	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		35.000.000,00	

2.	Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur			30.000.000	Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur			50.000.000	
3.	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	40.000.000	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Lampung Timur	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		100.000.000	
4.	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah usulan penindaklayakan, usulan yang terverifikasi dan tervalidasi dan usulan perbaikan yang dilaksanakan	513.535 usulan	230.000.000	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Lampung Timur	Jumlah usulan penindaklayakan, usulan yang terverifikasi dan tervalidasi dan usulan perbaikan yang dilaksanakan	513.535 usulan	0	
VI	Program Penanganan Bencana	Lampung Timur	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)	orang	315.000.000	Program Penanganan Bencana	Lampung Timur	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa) (SPM)	965 orang	590.000.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard	orang	215.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Cakupan Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya yang sesuai standard	Orang	440.000.000	

1.	Penyediaan Makanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	200.000.000	Penyediaan Makanan	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350.000.000	
2.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Lampung Timur	Junlah orang yang mendapatkan Penanganan khusus bagi kelompok rentan Kewenangan Kabupateb/Kota	10 orang	5.000.000	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Lampung Timur	Junlah orang yang mendapatkan Penanganan khusus bagi kelompok rentan Kewenangan Kabupateb/Kota	Orang	30.000.000	
3.	Pelayanan dukungan psikososial	Lampung Timur	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupateb/Kota	10 orang	5.000.000	Pelayanan dukungan psikososial	Lampung Timur	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupateb/Kota	Orang	30.000.000	
4.	Penyimpanan tempat penampungan pengungsi	Lampung Timur	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	10 orang	5.000.000	Penyimpanan tempat penampungan pengungsi	Lampung Timur	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		30.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	org	100.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupate/Kota	Lampung Timur	Jumlah TAGANA aktif yang mendapat pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	Org	150.000.000	
1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	57 org	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Lampung Timur	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	org	150.000.000	

			Kewenangan Kabupaten/Kota					Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
VII.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Lampung Timur	Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)	100 %	98.000.000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Lampung Timur	Taman makam pahlawan berfungsi dengan baik (%)	100 %	140.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan	100 %	98.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Persentase Areal makam pahlawan yang ditangani, pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman serta peringatan hari Pahlawan	100 %	140.000.000	
1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 dok	40.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	dok	80.000.000	
2.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6 laporan	58.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Lampung Timur	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	laporan	60.000.000	
Jumlah					7.129.269.894					8.912.559.292	

BAB IV**PENUTUP**

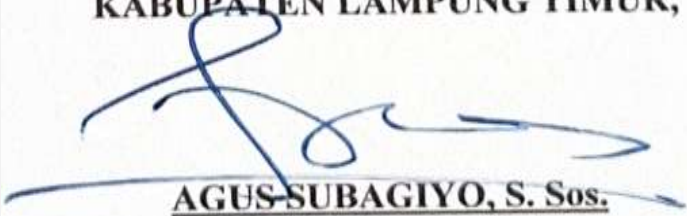
Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Dinas Sosial agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Lampung Timur tergantung pada dedikasi dan kompetensi sumber daya manusianya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dapat terlaksana secara tepat guna, tepat sasaran, efisien, sinergis dan berkesinambungan.

Sukadana,

2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



AGUS SUBAGIYO, S. Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199003 1 012

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKPD)

TAHUN 2025



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur.

Diharapkan Renja ini dapat mendorong instansi Pemerintah khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar serta mendorong tumbuhnya instansi Pemerintah yang akuntabel.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Selain itu kami juga menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan Kritik, saran dan masukan demi Penyempurnaan RENJA ini.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat Taufik dan Hidayah Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Amin.

Sukadana, 11 Juli 2024

**KEPALA DINAS
KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



BUDI YUL HARTONO, S.IP.M.IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650620 198603 1 011

DAFTAR ISI

Halaman	
Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	9
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	12
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	12
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	14
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS SKPD.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	26
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	26
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD.....	27
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	28
BAB IV. PENUTUP.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan kesinambungan upaya pembangunan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerinth Daerah, Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 sebagai bahan Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dan berdasarkan Undang-undang No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan melibatkan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan didasarkan pada Rencana Strategis SKPD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran teknis dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana termaktub dalam RPJMD Kabupaten serta masukan/aspirasi dari masyarakat sebagai hasil MUSRENBANG Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 juga mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Rencana Kerja Kementerian Tenaga Kerja yang terintegrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan sasaran pokok prioritas pembangunan daerah : Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2025 akan menjadi acuan perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta akan ditindaklanjuti dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026.

Visi Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 :

Visi pada hakekatnya adalah pandangan jauh kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, produktif, berdaya guna serta berhasil guna.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026, Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 adalah :

“Rakyat Lampung Timur Berjaya”.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) misi pembanguna yang terdiri atas :

Misi Pertama : Meningkatkan program petani berjaya. Bermakna untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik dan menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana fisik.

Misi Kedua : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis pedesaan. Dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Misi Ketiga : Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi Keempat : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.

Misi Kelima : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Misi Keenam : Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab). Dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan

Misi Ketujuh : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal

Misi Kedelapan : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana.

Misi Kesembilan : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mendapatkan amanah untuk menjalankan **Misi 3 (Ketiga) “Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan” dan Misi 4 (keempat) yaitu: “Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka**

meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal”.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang teknis operasionalnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, adapun susunan organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan fungsional.
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kabupaten Lampung Timur adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
2. Pelaksanan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat kabupaten;
3. Pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaanya Kabupaten Lampung Timur;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan dan perkembangan data koperasi;
5. Pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
6. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan pelaksanaan usaha koperasi serta penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi baik pola konvensional maupun pola syariah;
7. Penerapan peraturan dan sanksi kepada koperasi;
8. Pelaksanaan fasilitasi usaha koperasi tingkat kabupaten dan usaha mikro;
9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro;
10. Pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan;
11. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkeoperasian, usaha mikro dan tenaga kerja;
12. Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja di tingkat kabupaten;
13. Pelaksanaan advokasi perlindungan kepada koperasi usaha mikro dan tenaga kerja di tingkat kabupaten;
14. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tingkat kabupaten;
15. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten;
16. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
17. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja;
18. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro di tingkat kabupaten;
19. Pelaksanaan penanganan kasus koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja tingkat kabupaten;

- 20. Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi pembina dan gerakan koperasi tingkat kabupaten;
- 21. Pembinaan organisasi, penempatan dan perluasan tenaga kerja;
- 22. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- 23. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sumber Daya (SDM)

Jumlah Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kabupaten Lampung Timur per Januari 2024 sebanyak 71 orang, terdiri dari :

a. Berdasarkan Golongan :

- Golongan IV : 10 orang
- Golongan III : 33 orang
- Golongan II : 1 orang
- Golongan I : - orang
- Pegawai Honorer : 27 orang

b. Berdasarkan Pendidikan :

- Pasca Sarjana (S-2) : 10 orang
- Sarjana Strata 1(S-1) : 36 orang
- Sarjana Muda/ Diploma III : 2 orang
- SMA : 2 orang
- SMP : - orang

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman kepada :

- 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja adalah menjelaskan rumusan prioritas pembangunan, program, sasaran program, indikasi kegiatan, lokasi, sumber dana dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur. Selain itu juga Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2025 disusun agar menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama dengan DPRD.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur adalah :

1. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan secara teknis administratif

dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025.

2. Memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan.
3. Memberikan gambaran tentang target apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD merupakan kegiatan lanjutan dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur merencanakan program dan Kegiatan serta jumlah Anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 9 Program
- Jumlah Kegiatan : 16 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan : 36 Sub Kegiatan
- Rencana Anggaran : Rp. 6.604.965.872

Dari Rencana Kerja tersebut, pada akhir tahun 2023 pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran terealisasi sebagai berikut :

- Jumlah Program : 9 Program atau 100 %
- Jumlah Kegiatan : 16 Kegiatan atau 100 %
- Jumlah Sub Kegiatan : 36 Sub Kegiatan
- Jumlah Anggaran : Rp. 6.294.689.444 atau 95,30 % dari Rencana Anggaran Tahun 2023

Sisa anggaran 4,7% dari total anggaran belanja langsung tidak terserap dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari APBD Kabupaten Lampung Timur dan penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa sehingga hal ini menguntungkan pemerintah daerah karena realisasi secara fisik mencapai 100%.

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 serta Realisasi Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Pagu Anggaran dan Realisasi TA. 2023

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	25.000.000	24.478.600	97,91
2.	Penempatan Tenaga Kerja	76.000.000	52.179.800	68,66
3.	Hubungan Industrial	115.225.600	112.099.300	97,28
4.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.541250.148	5.413.227.349	97,69
5.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50.000.000	43,717,700	87,44
6.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	30.481.920	30.479.700	99,99
7.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	25.000.000	25.000.000	100
8.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	406.770.000	406.770.000	100
9.	Pengembangan UMKM	335.238.804	186.741.004	55,70
TOTAL JUMLAH		6.604.965.872	6.294.689.444	95,30

Untuk Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur merencanakan program dan Kegiatan serta jumlah Anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 9 Program
- Jumlah Kegiatan : 16 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan : 36 Sub Kegiatan
- Rencana Anggaran : Rp. 6.397.662.771
- Terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi : Rp. 6.362.184.771,-
 - b. Belanja Modal : Rp. 35.478.000,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan terhadap IKU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

1. Mewujudkan koperasi, serta usaha kecil, mikro dan menengah yang berkualitas

Tabel 1
Dari Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Ket
1	Persentase Koperasi Aktif	25	26,92	107,68	
2	UMKM yang naik level	0,20	1,07	535	

Sesuai dengan tabel diatas, indikator koperasi aktif yang terealisasi adalah 26,92% dari total koperasi aktif 133 unit untuk tahun 2023. Jumlah koperasi berdasarkan ODS pada tahun 2023 sejumlah 697 koperasi, namun ada 203 unit usaha yang masuk dalam pembubaran koperasi, sehingga jumlah koperasi yang ada sebanyak 484 unit usaha.

Untuk indikator UMKM yang naik level pada tahun 2023 terealisasi 1,07% dari target 0,20%. Pada indikator ini realisasi lebih besar dari target dikarenakan adanya kemudahan dalam proses pendaftaran NIB dan PIRT. Jumlah UMKM pada tahun 2023 sebanyak 41.327 unit usaha yang terdiri dari : usaha mikro sebanyak 43.636 unit usaha, usaha kecil sebanyak 6.569 unit usaha dan usaha menengah sebanyak 122 unit usaha

Sesuai dengan tabel diatas, evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap indikator jumlah Koperasi aktif pada tahun 2023 masuk dalam kategori *Sangat Tinggi*, hal ini disebabkan oleh kesadaran berkoperasi pada kelompok masyarakat semakin meningkat. Kemudian untuk indikator UMKM yang naik level juga masuk pada kategori *Sangat Tinggi*, hal ini disebabkan oleh kemudahan-kemudahan dalam mengurus perizinan baik itu NIB ataupun PIRT.

Adapun pembinaan yang dilakukan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dan tenaga Kerja kepada koperasi memberikan

pendampingan Pra RAT, penyuluhan perkoperasian, pendampingan perizinan koperasi, pengawasan kepada koperasi, penilaian kesehatan dan memberikan pelatihan kepada SDM Koperasi berupa pelatihan manajemen usaha koperasi, pelatihan bagi pengurus koperasi dan pelatihan bagi pengawas koperasi. Adapun untuk UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro, memberikan fasilitasi berupa bantuan permodalan bagi usaha mikro, meingkatkan kapasitas SDM usaha mikro dengan aneka pelatihan vokasional antara lain: vokasional aneka kue, vokasional pengolahan hasil laut, disamping itu juga dinas berupaya untuk memberikan pendampingan kepada UMKM.

Dari hasil hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis diperoleh gambaran bahwa Indikator Sasaran 1 yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja untuk indikator persentase koperasi aktif 107,68% yang berarti capaian kinerjanya masuk dalam kategori *Sangat Tinggi*, sedangkan untuk indikator UMKM yang naik level 535%. Adapun Sasaran ini ditunjang oleh program yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Penilaian Kesehatan KSP/USP, Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, serta Program Pengembangan UMKM

Adapun Sasaran ini ditunjang oleh program sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Realisasi	Persentase
1.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	50.000.000	43.717.700	87,44
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam unuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	43.717.700	87,44
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	43.717.700	87,44
2.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	30.481.920	30.479.700	99,99
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan	30.481.920	30.479.700	99,99

	pinjam koperasi yang diwilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota			
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	5.481.920	5.480.000	99,96
	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	24.999.700	99,99
3.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	25.000.000	25.000.000	100
	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	25.000.000	25.000.000	100
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	406.770.000	406.770.000	100
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	406.770.000	406.770.000	100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	406.770.000	406.770.000	100
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	335.238.80	186.741.000	55,70
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	335.238.80	186.741.000	55,70
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	335.238.80	186.741.000	55,70

Dibawah ini beberapa gambar dari hasil pelaksanaan dari program dan kegiatan yang mendukung indikator yang bersumber dari dana APBD maupun dana DAK Non Fisik, yang mendukung keberhasilan capaian kinerja dari sasaran strategis 1 Mewujudkan koperasi, serta usaha kecil, mikro dan menengah yan berkualitas.

- Untuk Tahun 2023 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari Kementrian Koperasi dan UKM sebesar Rp. 406.770.000,- adapun dana tersebut ditujukan untuk peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UKM melaui Kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 (empat) Angkatan masing-masing sebanyak 60 (enam puluh) orang peserta. Peserta dalam

kegiatan ini terdiri dari 30 (tiga puluh) orang pengurus koperasi dan 60 (enam puluh) orang pelaku UKM, sehingga jumlah keseluruhan peserta 120 (seratus dua puluh) orang. Pemateri dalam kegiatan ini berasal dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab.Lampung Timur, Widya Iswara dan dari pelaku UKM.



- Melalui kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Dasain dan teknologi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan tenaga Kerja memberikan fasilitasi sebagai upaya untuk meningkatkan skala usaha menjadi usaha kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 335.238.804,- anggaran tersebut diperuntukkan guna pelatihan-pelatihan singkat di beberapa kecamatan dan dana hibah yang diperuntukkan bagi usaha mikro. Adapun pelatihan singkat yang diadakan di beberapa titik di wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan materi pembuatan ayam crispy dengan jumlah peserta 30 orang di masing-masing titik, jumlah total 270 orang.

Pelatihan tersebut dilaksanakan di beberapa Kecamatan, yakni :

1. Kecamatan Pekalongan
 - Desa siraman
 - Desa Tulusrejo
 - Desa Jojog
 - Desa Wonosari
 - Desa Ganti Mulyo
2. Kecamatan Batanghari Nuban :
 - Desa Trisno Mulyo
3. Kecamatan Raman Utara :
 - Desa Raman Aji
4. Kecamatan Marga Sekampung :
 - Desa Karya Basuki
5. Kecamatan Waway Karya

Selain pelatihan singkat juga dalam kefiatan ini juga memberikan pendampingan terhadap usaha mikro serta pemberian hibah berupa uang kepada 14 unit usaha mikro, bantuan hibah uang tersebut berkisar Rp. 5.000.000 s.d 30.000.000,-





- Dalam upaya meningkatkan peluang pemasaran produk UMKM Kabupaten Lampung Timur telah bekerjasama dengan retail modern Indomaret dan Alfamart untuk 7 (tujuh) produk UMKM :








BAZAR PRODUK UMKM

KAB. LAMPUNG TIMUR










☎ 1500-280
🌐 www.indomaret.co.id
🌐 www.klikindomaret.com
📱 [indomaretlampung](#)

Upaya lainnya dengan membuat gerai UMKM di tiap titik kecamatan. Sampai dengan saat ini akan dibuat 10 titik gerai UMKM, yaitu sebagai berikut :

Titik gerai UMKM produk makanan ringan :

- Kecamatan Pekalongan (Madiyati)
- Kecamatan Labuhan Maringgai (Muslim dan Nur Sabily)
- Kecamatan bandar Sri Bhawono (Dasih)
- Kecamatan Way Jepara (Nonya Tulien)
- Kecamatan Batanghari (Bariah)
- Kecamatan Sekampung (Kasmiyati)
- Kecamatan Way Bungur (Gerai Bening)
- Kecamatan Pugung Raharjo dan Kecamatan Sekampung Udik (Suliyono)
- Kecamatan Pasir Sakti (Iyem)
- Kecamatan Waway Karya (Gerai Lek Min)

Titik Gerai UMKM Ekonomi Kreatif (hand craf) :

- Kecamatan Purbolinggo (Ishak)
- Kecamatan Sekampung (Qori)
- Kecamatan Labuhan ratu (Barata/Rahmat Basuki)

2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja

Tabel 2
Dari Indikator Kinerja sasaran 2

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Ket
1	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	1	0	0	

Sesuai dengan tabel diatas, untuk indikator persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0%, hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran yang diterapkan pada TA 2023 dan pada tahun 2023 Kabupaten Lampung Timur tidak mendapat kuota untuk mengirimkan peserta pelatihan ke BLK pusat. Adapun pada sasaran ini pada program Pelatihan Kerja dan Produktifitas kerja mengalami efisiensi yang mengakibatkan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tidak dapat tercapai dengan baik.

Adapun Sasaran ini ditunjang oleh program yaitu :

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Realisasi	Persentase
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	25.000.000	24.478.600	97,91
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	25.000.000	24.478.600	97,91
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	25.000.000	24.478.600	97,91
2.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	34.342.200	34.272.900	99,80
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	31.000.000	19.394.500	62,56
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	31.000.000	19.394.500	62,56
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	32.785.300	72,86
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran	25.000.000	14.776.600	59,11

	Indonesiia (PMI)/Pekerja Migran Indonesiia (PMI)			
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	25.000.000	14.776.600	59,11

3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja

Tabel 3

Dari Indikator Kinerja sasaran 3

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Ket
1	Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	86	100	11,64	

Berdasarkan table 3 diatas dari indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama terealisasi sebesar 100%, dari 2 kasus perselisihan dapat diselesaikan. Secara keseluruhan pada sasaran strategis meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja terealisasi sebesar 117,64% yang artinya tingkat capaian kinerja dalam kategori *sangat tinggi*.

Adapun Sasaran ini ditunjang oleh program yaitu :

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Realisasi	Persentase
1.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	95.000.000	91.939.700	96,77
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Gubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	95.000.000	91.939.700	96,77
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	26.939.900	89,79
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	64.999.800	99,99

Dibawah ini beberapa gambar dari hasil pelaksanaan dari program dan kegiatan yang mendukung indikator yang bersumber dari dana APBD, yang mendukung keberhasilan capaian kinerja dari sasaran strategis 3 Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja.

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 kasus perselisihan hubungan industrial yang berhasil diselesaikan dengan perjanjian bersama oleh mediator tenaga kerja dari 2 kasus dapat terealisasi 100%





2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan yang berasal dari lingkungan dalam (internal) maupun dari lingkungan luar (eksternal). Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2016-2021, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2016 – 2021, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dengan permasalahannya :

- a. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, antara lain :
 - 1) Masih kurangnya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan teknis di bidang koperasi;
 - 2) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas lapangan;
 - 3) Masih kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM Pengurus dan Anggota Koperasi) terhadap Standard dan Operating Procedure (SOP) dalam pengelolaan koperasi (Pembukuan dan pemasaran) serta pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang koperasi;

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Mengusulkan Penambahan Pegawai dengan latar belakang pendidikan Teknis di Bidang Koperasi
- 2) Penambahan Sarana dan Prasarana secara bertahap
- 3) Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan yang menunjang tentang pengelolaan Lembaga Koperasi, serta pembinaan dan penyuluhan perundang-undangan.

- b. Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :

- 1) Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Lampung Timur;
- 2) Masih banyaknya pengiriman CPMI keluar negeri yang dilakukan secara ilegal;

- 3) Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan sekolah/pendidikan;
- 4) Masih tingginya pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan di perusahaan.

Adapun solusi untuk permasalahan di atas diantaranya adalah :

- 1) Meningkatkan jumlah dan sektor lapangan pekerjaan di Kabupaten Lampung Timur;
- 2) Perlu ditingkatkan pengawasan/pemantauan terhadap kegiatan pengiriman CPMI keluar negeri melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan LPTKS.
- 3) Meningkatkan kelulusan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi di masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja.
- 4) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan serta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang termaktub dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan membangun keunggulan global dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi UMKM-K dalam perekonomian.
2. Meningkatnya daya saing UMKM.
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif.
4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi

Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional masuk dalam agenda prioritas pembangunan kesatu (nawacita) yaitu menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara melalui perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran dan agenda nawacita keenam yaitu meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Adapun Agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan :

1. Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional
2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja
3. Percepatan sertifikasi profesi
4. Perluasan kesempatan kerja formal

5. Penguatan wirausaha produktif
6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif
7. Penegakan hukum ketenagakerjaan
8. Peningkatan perlindungan pekerja migran
9. Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 adalah *“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*

Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan. Yaitu percepatan pemulihan ekonomi yang didorong pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi dan peningkatan nilai tambah yang didukung oleh reformasi iklim usaha.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah kebijakan yang mengurangi ketimpangan antar wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Terutama penanganan limbah B3 medis pasca pandemic covid 19 serta peningkatan kualitas udara, air, laut dan lahan sebagai penyangga system kehidupan masyarakat.

- Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi.

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Tahun 2025		
No	Indikator Capaian Nasional	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 - 5,8
2.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	5,5 – 6,2
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9
4.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	73,44 – 73,48
5.	Penurunan emisi gas rumah kaca (%)	26,8 – 27,1
6.	Indeks Gini	0,376 -0,378
7.	Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan	

- Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025
Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah *“Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya”*
Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 :
 - Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan.
 - Meningkatkan kualitas SDM.
 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
 - Reformasi Birokrasi.
 - Kehidupan Masyarakat yang religious, aman, dan berbudaya.
 - Isu lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025		
No	Indikator Makro Pembangunan	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 – 5,5
2.	Inflasi	3,0 ± 1
3.	PDRB per Kapita	45 – 46
4.	Tingkat Pengannguran terbuka (%)	4,0 – 3,8
5.	Indeks Pembangunan Manusia	70,6 – 70,9

6.	Indeks Gini	0,293 –
7.	Nilai Tukar Petani	105 - 106
8.	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	78
9.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,5 – 10,9
10.	Pertumbuhan PAD	8,47
11.	Penurunan Emisi dan Gas Rumah Kaca	7,29

c. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mengusung Tema :
 “Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, *Pelayanan Publik, dan Kulaitas Sumber Daya Manusia untuk Produktivitas dan Daya Saing*”

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Peningkatan nilai investasi produk dan nilai tambah produk lokal; .
2. Pembangunan infrastuktur;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan kualitas hidup yang aman, religius, dan berbudaya;
6. Peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

No	Indikator Capaian Daerah	2022 (Baseline)	2025 (Proyeksi)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Belum rilis	3,0-3,5
2.	PDRB per Kapita ADHB (juta/kapita/tahun)	Belum rilis	43,5-45,0
3.	Indeks Pemabangunan manusia	70,85	73,5-74,0
4.	Persentase penduduk miskin (%)	13,98	11,5-12,5

5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	2,0-2,5
6.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	47,29	49,5-50,0

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran rencana kerja sebagai suatu strategi yang akan dilaksanakan secara nyata oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, yang mencakup penataan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan UMKM, serta pengendalian dan pengawasan koperasi.
2. Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, yang mencakup penyediaan dukungan pemasaran berupa Promosi produk unggulan, kemitraan dan peningkatan mutu produk unggulan.
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM, yang mencakup pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan, kualitas SDM Koperasi dan UMKM.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pejabat dilingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
5. Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif, yang meliputi peningkatan akses permodalan, pengembangan dan pengendalian KSP yang disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolanya, pengembangan sentra UMKM.
6. Memperkuat kelembagaan koperasi, yang mencakup peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi, ketatalaksanaan koperasi, dan keanggotaan koperasi.

7. Penyusunan rencana tenaga kerja Kabupaten Lampung Timur sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Timur.
8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja dan Peningkatan wirausaha produktif.
10. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif
11. Meningkatkan perlindungan pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Lampung Timur.

3.3 Program dan Kegiatan

Dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan diatas untuk mewujudkannya ditetapkan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS

TENAGA KERJA

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
- b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online
- b. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

C. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

- a. Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor

kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

D. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang diwilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP

- a. Kegiatan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN

- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

G. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha kecil
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah;

Visi Kabupaten Lampung Timur adalah : “**Rakyat Lampung Timur Berjaya**”, visi tersebut akan tercapai dengan cara

melaksanakan misi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga kerja Kabupaten Lampung Timur melaksanakan **Misi yang Ketiga yaitu : “Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, Pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan”**, serta **misi Keempat dari Bupati yaitu : “Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMdes, BUMD, lembaga keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal”**

Kabupaten Lampung Timur dengan melaksanakan seluruh Program program dan kegiatan yang berkesinambungan dan sejalan agar tercapai misi dan pokok pokok pikiran Bupati yang telah ditetapkan, keberhasilan dan pencapaian kinerja Dinas yang maksimal akan berpengaruh positif terhadap visi dan misi Bupati Lampung Timur, begitu juga sebaliknya apabila kinerja Dinas tidak mencapai target yang telah ditentukan akan mempengaruhi performa pembangunan secara umum pemerintah daerah.

- Pengentasan pengangguran.

Pengentasan pengangguran bukan saja menjadi tugas dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan instansi yang bersangkutan tetapi menjadi tugas dan kewajiban dari seluruh organisasi perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dalam program dan kegiatannya akan menyasar masyarakat pencari kerja yang tersebar di beberapa wilayah se Kabupaten Lampung Timur.

Pengembangan ekonomi daerah, diantaranya dengan menentukan arah kebijakan pengembangan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah diantaranya dengan cara :

- Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian daerah;
Meningkatkan peran koperasi disini maksudnya bukan hanya dari membentuk koperasi baru, akan tetapi lebih kepada melakukan pembinaan yang intensif terhadap koperasi baik itu secara kelembagaan dan usaha;
- Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- Pelatihan berbasis kompetensi dan juga pelatihan bagi kelompok usaha bersama.
- Fasilitasi perlindungan terhadap PMI dan penempatan tenaga kerja.
- Fasilitasi penanganan kasus perselisihan ketenagakerjaan dan juga monitoring kepersertaan tenaga kerja dalam jamsostek.

Dari uraian diatas, dapat digambarkan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- Jumlah program : 9 (sembilan) program
- Jumlah kegiatan : 18 (delapan belas) kegiatan
- Jumlah sub kegiatan : 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif : **Rp. 7.880.768.361,-**
(Tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) berasal dari dana APBD yang dilaksanakan tersebar se- Kabupaten Lampung Timur.

Untuk melihat lebih detail tentang Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel Rumusan Program/Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta merupakan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) sebagai bentuk pertanggung jawaban tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Demikian semoga Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, sehingga secara sinergis seluruh upaya pembangunan mampu mewujudkan visi pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah yang sejahtera, berdaya saing, religius dan berkelanjutan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DSAR				7.880.768.361				
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				426.205.432				
2	7	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Cakupan masyarakat yang dilatih dengan pelatihan berbasis kompetensi	Tersebar	100%	100.000.000				
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan masyarakat yang dilatih dengan pelatihan berbasis kompetensi		3%	76.000.000				
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Lamtim	30 orang	76.000.000			30 orang	2.000.000
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Cakupam terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Tersebar	100%	24.000.000				
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Tersebar	10 lembaga	24.000.000	APBD		12 lembaga	112.500.000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengembangan penempatan tenaga kerja	Tersebar	100%	211.205.432				
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya media penyebaran informasi lowongan pekerjaan secara online	Tersebar	1 tahun	20.000.000				
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Lamtim	500 dokumen	20.000.000	APBD		1200 dokumen	150.000.000

2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitasi dan bantuan dari pemerintah daerah kepada CPMI/PMI bermasalah	Tersebar	100%	191.205.432				
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migan Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesiia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Tersebar	1500 orang	171.205.432	APBD		1500 orang	125.000.000
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Lamtim	1000 orang	20.000.000	APBD	Terlaksananya pelayanan bagi CPMI yang optimal	1200 orang	125.000.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terbangunnya Hubungan Industrial yang harmonis	Tersebar	100%	115.000.000				
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengesahan PP dan PKB serta pelaksanaan Jamsostek	Tersebar	100%	20.000.000				
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Tersebar	30 laporan	20.000.000	APBD		30 laporan	175.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Terbinanya hubungan industrial yang kondusif dan harmonis	Tersebar	100%	95.000.000				
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Tersebar	5 perkara	25.000.000	APBD	Fasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan	5 perkara	210.000.000

2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Tersebar	1 lembaga	70.000.000	APBD	Terlaksananya program kerja lembaga kerjasama tripartit Kabupaten Lampung Timur dan terselenggaranya operasional dewan pengupahan Kabupaten Lampung Timur	1 lembaga	210.000.000
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.454.562.929				
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terselenggaranya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Lam-Tim	12 bulan	6.379.562.929				
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Lam-Tim	12 bulan	55.600.000	APBD			
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lam-Tim	3 dokumen	8.000.000	APBD		3 dokumen	40.000.000
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lam-Tim	1 dokumen	8.500.000	APBD		1 dokumen	30.000.000
2	17	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan	umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lam-Tim	1 dokumen	8.100.000			1 dokumen	30.000.000
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Lam-Tim	1 dokumen	7.000.000	APBD		1 dokumen	35.000.000
2	17	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Lam-Tim	1 dokumen	7.000.000			1 dokumen	35.000.000

2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lam-Tim	12 laporan	8.500.000	APBD		12 laporan	30.000.000
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lam-Tim	4 dokumen	8.500.000	APBD		4 dokumen	30.000.000
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertatanya administrasi keuangan	Lam-Tim	12 bulan	5.018.231.076	APBD			
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lam-Tim	43 orang/bulan	4.851.731.076	DAU		43 orang/bulan	4.973.024.353
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lam-Tim	12 laporan	120.000.000	APBD		12 laporan	590.000.000
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lam-Tim	100 dokumen	32.000.000	APBD		200 dokumen	45.000.000
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lam-Tim	1 laporan	9.500.000	APBD		1 laporan	15.000.000
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lam-Tim	12 laporan	5.000.000	APBD		12 laporan	25.000.000
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi pengelolaan barang daerah	Lam-Tim	100%	28.310.000	APBD			
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lam-Tim	12 laporan	28.310.000	APBD		12 laporan	50.000.000
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang kantor	Lam-Tim	100%	276.611.293	APBD			
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lam-Tim	1 paket	6.000.000	APBD		1 paket	10.000.000

2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lam-Tim	1 paket	95.500.000	APBD		1 paket	150.000.000
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Lam-Tim	1 paket	10.530.000	APBD		1 paket	20.000.000
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lam-Tim	1 paket	6.500.000			1 paket	10.000.000
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lam-Tim	1 paket	24.000.000	APBD		1 paket	45.000.000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lam-Tim	60 laporan	134.081.293	APBD		60 laporan	228.000.000
2	17	01	2.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Lam-Tim	100%	217.784.000				
2	17	01	2.08	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Lam-Tim	2 unit	217.784.000	APBD		2 unit	225.000.000
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang kantor	Lam-Tim	100%	446.886.560	APBD			
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lam-Tim	12 laporan	48.000.000	APBD		12 laporan	52.000.000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lam-Tim	12 laporan	398.886.560	APBD		12 laporan	400.000.000
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	Lam-Tim	100%	336.140.000	APBD			
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Lam-Tim	7 unit	269.020.000	APBD		9 unit	400.000.000
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lam-Tim	15 unit	17.120.000	APBD		20 unit	25.000.000

2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lam-Tim	1 unit	50.000.000	APBD		1 unit	60.000.000
2	17	02			Program Pelayanan Izin Usaha SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi	Tersebar	100%	60.000.000	APBD			
2	17	02	2.01		Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	Tersebar	30 unit usaha	60.000.000	APBD			
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar	30 unit usaha	60.000.000	APBD	Fasilitasi pembuatan NIK serta pendampingan dan edukasi pengurusan IUSP bekerjasama dengan instansi terkait	15	75.000.000
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi menyelenggarakan RAT tepat waktu	Tersebar	50%	50.000.000				
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang diwilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Tersebar	30 unit usaha	50.000.000	APBD			
2	17	03	2.01	03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar	15 unit usaha	25.000.000	APBD		40 koperasi	70.000.000
2	17	03	2.01	04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Tersebar	15 unit usaha	25.000.000	APBD		40 koperasi	60.000.000
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Cakupan koperasi yang sehat baik usaha dan kelembagaannya	Tersebar	7%	25.000.000	APBD			

2	17	04	2.01		Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya penilaian usaha dan kelembagaan koperasi serta tersusunnya data kesehatan koperasi	Tersebar	15 unit usaha	25.000.000	APBD			
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Tersebar	15 unit usaha	25.000.000	APBD		40 koperasi	100.000.000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan Meningkatnya pemahan dan pengetahuan tentang Perkoperasian	Tersebar	40%	100.000.000	APBD			
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Lamtim	40 koperasi	100.000.000	APBD			
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Lamtim	70 orang	100.000.000	APBD	Penyuluhan Pembentukan Koperasi, Penyuluhan Pra RAT dan RAT dan Sosialisasi Peraturan Perkoperasian	50 koperasi	890.000.000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil	Tersebar	15%	840.000.000	APBD			
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha kecil	Cakupan UMKM yang dibina	Tersebar	2%	840.000.000	APBD			
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Dasain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Tersebar	511 unit usaha	840.000.000	APBD		50 kelompok	575.000.000
JUMLAH									7.880.768.361				10.432.524.353

RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pelayanan Sektor Komunikasi dan informatika di Kabupaten Lampung Timur meliputi peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang berkembangnya sektor perekonomian daerah. Oleh sebab itu maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan aktivitas komunikasi dan informatika daerah untuk terus berupaya agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan namun tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelayanan sehari-hari, Dinas Komunikasi dan Informatika berhubungan langsung dengan masyarakat, sedangkan pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan kegiatan, ketersediaan informasi yang memadai.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan mengkoordinasikan kegiatan usaha jasa media elektronik, komunikasi dan informasi yang memerlukan pemikiran untuk menggali potensi yang berkembang, khususnya dalam ruang lingkup Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan layanan komunikasi dan informatika daerah yang tertib dan bertanggungjawab.

I.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA–SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4844)
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan tujuan untuk :

- a. Mensinkronisasi prioritas pembangunan dari berbagai kecamatan dan atau instansi lain.
- b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berikutnya.
- c. Menyesuaikan prioritas program/kegiatan dengan plafond/pagu dana setiap SKPD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yaitu mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Lampung Timur kedalam rencana kegiatan Pembangunan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2021 sampai dengan 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB.I.PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RKPD.

BAB. II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

Bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023, analisis kinerja pelayanan SKPD serta isu-isu penting penyeleggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2025 serta perkiraan tahun 2026, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2026, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 telah melaksanakan sebanyak **5 program** dengan **11 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan**, dengan realisasi kegiatan adalah 95,97 %. Dengan kinerja yang semakin ditingkatkan, pada tahun 2025 ini Dinas Komunikasi dan Informatika menargetkan realisasi yang lebih besar, yaitu bisa mencapai 99 %. Tentunya hal ini untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Lampung Timur, yaitu :

Visi

“ Rakyat Lampung Timur Berjaya “.

Misi

- 1). Meningkatkan program petani berjaya.
- 2). Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan.
- 3). Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial masuarakat.
- 4). Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
- 5). Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
- 6). Meningkatkan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab.
- 7). Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan lokal.
- 8). Meningkatkan penanganan Covid-19, pencegahan dan pemebrantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
- 9). Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

2.1.1 Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA (RP)			CAPAIAN HASIL / KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	RENCANA (%)	REALISASI (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELANJA DAERAH	9.609.035.559,00	9.221.965.164,00	387.070.395 ,00	100%	95,97	
	BELANJA OPERASI	9.609.035.559,00	9.221.965.164,00	387.070.395 ,00	100%	95,97	
	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.826.071.974,00	4.606.910.934,00	219.150.940,00	100%	95,46	
	1. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	54.825166,00	54.452.353,00	362.813,00	100%	99,32	
	1 SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	7.847.514,00	7.769.320,00	78.194,00	100%	99,00	
	2 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	8.379.027,00	8.337.253,00	41.774,00	100%	99,50	
	3 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DOKUMEN RKA SKPD	8.106.855,00	8.068.128,00	38.727,00	100%	99,52	
	4 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	6.975.342,00	6.897.320,00	78.022,00	100%	98,88	
	5 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA PERUBAHAN SKPD	6.975.342,00	6.962.320,00	13.022,00	100%	99,81	
	6 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.187.479,00	8.158.192,00	31.287,00	100%	99,62	
	7 SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.353.607,00	8.261.820,00	81.787,00	100%	98,90	

	2.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT	3.922.252.923,00	3.771.352.273,00	150.900.650,00	100%	96,15	
	1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.630.210.829,00	3.489.319.133,00	140.891.696,00	100%	96,12	
	2	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	226.889.300,00	217.080.000,00	9.809.300,00	100%	95,68	
	3	SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	34.920.000,00	34.920.000,00	0,00	100%	100,00	
	4	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.943.850,00	8.935.376,00	8.474,00	100%	99,91,00	
	5	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	10.759.549,00	10.678.096,00	81.453,00	100%	99,24	
	6	SUB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	10.529.395,00	10.419.668,00	109.727,00	100%	98,96	
	3.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	
	1	SUB KEGIATAN PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	7.800.000,00	0,00	0,00	0%	0,0	

	5.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	211.848.600,00	162.939.200,00	48.909.400,00	100%	76,91	
	1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.984.690,00	9.922.000,00	62.690,00	100%	99,37	
	2	SUB KEGIATAN RALATAN DAN PERELENGKAPAN KANTOR	31.004.991,00	30.827.250,00	177.741,00	100%	98,57	
	3	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR	14.009.544,00	13.954.000,00	55.544,00	100%	99,60	
	4	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.309.640,00	50.309.598,00	42,00	100%	99,99	
	5	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	54.120.000,00	47.150.000,00	6.970.000	100%	87,12	
	6	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	71.973.400,00	62.686.146,00	9.287.254,00	100%	87,10	
	6.	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	
	1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	

	7.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	208.522.120,00	198.692.644,00	9.829.476,00	100%	95,29	
	1	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK	17.530.600,00	9.973.543,00	7.557.057,00	100%	56,89	
	2	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	190.991.520,00	188.719.101,00	2.272.419,00	100%	98,81	
	8.	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	401.269.500,00	367.564.670,00	33.704.730,00	100%	91,60	
	1	SUB KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.670.000,00	34.867.960,00	3.802.040,00	100%	80,00	
	2	SUB KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	349.923.400,00	320.040.710,00	29.882.690,00	100%	91,46	
	3	SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.676.100,00	12.656.000,00	20.000	100%	99,84	

	II.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.176.983.730,00	2.099.093.400,00	76.064.219,00	100%	96,42	
	1.	KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.176.983.730,00	2.099.093.400,00	76.064.219,00	100%	96,42	
	1	SUB KEGIATAN MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	65.532.008,00	21.364.900,00	44.167.108,00	100%	32,60	
	2	SUB KEGIATAN MONITORING INFORMASI DAN PENETAPAN AGENDA PRORITAS KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	161.465.893,00	158.255.500,00	3.210.393,00	100%	98,01	
	3	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	1.094.277.394,00	1.087.429.300,00	6.848.094,00	100%	99,37	
	4	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	128.832.946,00	128.390.200,00	442.746,00	100%	99,66	
	5	SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	147.833.675,00	131.841.100,00	15.992.575,00	100%	89,18	
	6	SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	523.147.838,00	523.030.500,00	117.338,00	100%	99,98	
	7	SUB KEGIATAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	22.804.320,00	16.589.900,00	5094.420,00	100%	73,19	
	8	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA DAN PRSARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	33.089.656,00	32.092.000,00	101.545,00	100%	96,98	

III.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA	2.191.414.202,00	2.142.123.806,00	49.290.396,00	100%	97,75	
1.	KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	693.793.494,00	691.315.740,00	2.477.754,00	100%	99,64	
1	SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.768.614,00	23.372.200,00	2.396.414,00	100%	90,70	
2	SUB KEGIATAN PEYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAHAN DAERAH	668.024.880,00	667.943.540,00	81.340,00	100%	99,99	
2.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.497.620.708,00	1.847.427.422,00	227.758.678,00	100%	89,02	
1	SINKRONISASI PENGELOLAAN RENCANA INDUK DAN ANGGARAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	144.000.000,00	143.428.500,00	571.500,00	100%	99,60	
2	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH	11.015.334,00	8.342.900,00	2.672.434,00	100%	75,74	
3	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH	915.863.467,00	893.272.100,00	22.591.359,00	100%	97,53	
4	SUB KEGIATAN SINKRONISASI SISTEM KEAMANAN INFORMASI	15.902.643,00	15.415.200,00	487.443,00	100%	96,93	

	5	SUB KEGIATAN LAYANAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK	176.227.378,00	160.151.185,00	16.076.193,00	100%	90,88	
	6	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	74.254.200,00	69.877.732,00	4.376.468,00	100%	94,11	
	7	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS	24.945.900,00	24.945.900,00	0,00	100%	100,00	
	8	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEEMRINTAH DAERAH	112.611.786,00	112.574.541,00	37.245,00	100%	99,97	
	9	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN GEVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO)	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100%	100,00	
	III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	278.147.188,00	247.332.900,00	30.814.288,00	100%	88,92	
	1.	KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	278.147.188,00	247.332.900,00	30.814.288,00	100%	88,92	
	1	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	75.979.247,00	52.915.000,00	23.064.247,00	100%	69,64	
	2	SUB KEGIATAN MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	202.167.941,00	194.417.900,0	7.750.041,00	100%	96,17	

III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	136.418.465,00	126.504.124,00	9.914.341,00	100%	92,73	
1.	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	136.418.465,00	126.504.124,00	9.914.341,00	100%	92,73	
1.	SUB KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	136.418.465,00	126.504.124,00	9.914.341,00	100%	92,73	
	TOTAL BELANJA	9.609.035.559,00	9.221.965.164,00	387.070.395 ,00	100%	95,97	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi :

- a) Penyediaan koneksi internet
- b) Revitalisasi Jaringan Fiber Optik Perangkat Daerah
- c) Pengelolaan layanan domain dan website desa
- d) Peningkatan publikasi melalui media cetak dan elektronik
- e) Peliputan kegiatan pembangunan
- f) Pengelolaan informasi publik melalui media sosial
- g) Pembuatan Portal Satu Data Indonesia
- h) Pembuatan Buku Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Capaian kinerja dinas mengenai pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2024 bisa dikatakan baik, tetapi pada tahun anggaran 2025 ini akan lebih ditingkatkan lagi. Hal ini tentunya untuk mendukung program-program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- Perlunya penguatan data center yang menjadi pusat data Kabupaten Lampung Timur, sehingga data-data akan lebih terkoordinasi.
- Perlunya Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik dan terintegrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur dan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Peningkatan Implementasi e-Government Kabupaten Lampung Timur.
- Perlunya meningkatkan penyediaan layanan informasi webside online yang **aman** secara hukum (PDP), teruji kebenarannya (anti-hoaks), dan mudah diakses oleh siapa saja.
- Perlunya pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal.
- Pembentukan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- Perlunya meningkatkan ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat.

- Perlunya kaderisasi dan pelatihan bagi operator PPID di tingkat OPD.
- Perlunya pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang menguasai Teknologi Informasi.
- Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu diupayakan aparaturnya untuk mengikuti pelatihan formal.
- Guna meningkatkan kemampuan tim media sosial dalam membuat berita, maka perlu dilaksanakan diklat jurnalistik.
- Dalam upaya peningkatan kinerja dinas agar lebih berkembang, maka perlu dilaksanakan studi banding ke daerah-daerah yang lebih maju dalam pengelolaan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika.
- Agar program-program nasional bisa dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika, maka perlu koordinasi yang lebih intensif ke Kementrian Kominfo.
- Agar pelayanan internet di seluruh PD tidak terhambat, maka anggaran penyediaan bandwidth harus ditambah lagi supaya mencukupi seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan hingga ke desa.
- Guna mengkover penawaran kerjasama dari seluruh media, maka anggaran untuk publikasi media massa harus ditambah lagi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Januari 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024. Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, pemerintah akan memprioritaskan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infra struktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas polhumkam dan tranformasi pelayanan publik..

RPJMN 2020-2024 adalah penjabaran atas visi dan misi Presiden Joko Widodo dan KH. Makruf Amin, merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2020-2025). RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, mejadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur juga harus merujuk pada Renstra Kementerian Kominfo untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pembangunan Komunikasi dan Informatika nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang komunikasi dan informasi berperan penting dalam kegiatan komunikasi dan informasi keseluruhan pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan komunikasi dan informasi berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Sesuai arahan RPJNN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh yang berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sementara visi kementerian Kominfo RI adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri dan berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”

Adapun Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu :

1. **Terwujudnya Indonesia Informatif**, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
2. **Masyarakat sejahtera**, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani.
3. **Pembangunan kominfo berkelanjutan**, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.
4. **Pembangunan kominfo yang merakyat**, adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.
5. **Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan**, adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.

6. **NKRI**, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh- sungguh.

Dari Visi Kementerian Kominfo tersebut ditetapkanlah Rumusan Misi, sebagaimana berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri dan Berdaya Saing ;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan ;
4. Mencapi Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan ;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa :
6. Menegakkan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya :
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih dan terpercaya :
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Kominfo memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RenjaDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur di Bidang Kominfo, yaitu:

1. Keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi.
2. Penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh teknologi informasi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang Komunikasi dan Informasi.
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan jasa usaha Bidang Komunikasi dan Informatika serta pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.2.1 TUJUAN

1. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang bertakwa, mandiri, handal, dan menguasai teknologi untuk menghadapi era globalisasi.
2. Melaksanakan catur tertib dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi, dan informatika sebagai penunjang perekonomian di perkotaan dan pedesaan.
4. Menyediakan akses informasi bagi kecamatan dan desa guna meningkatkan pengetahuan masyarakat disegala bidang.
5. Terselenggaranya layanan persandian dan layanan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

3.2.2 SASARAN

1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kemampuan teknis dan disiplin pegawai.
2. Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi, dan informasi bagi masyarakat.
4. Meningkatnya akses informasi guna peningkatan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatnya layanan persandian dan statistik dalam rangka penjaminan keamanan informasi dan pembangunan daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran guna pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
- 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA SKPD.
- 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
- 1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD
- 2.6. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.5. Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.7. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 5.8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Relasi Media
- 1.2. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- 1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- 1.4. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi
- 1.5. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik

C. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

2. Kegiatan Pengelolaan Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi
- 2.2. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- 2.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- 2.4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- 2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau kota Cerdas
- 2.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2.7. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor

- 1.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1.2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika serta menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua Pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Sukadana, Juni 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,




MANSUR SYAH, S.Sos., M.IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721018 200003 1 006

LAMPIRAN